

**PELANGGARAN HAM OLEH PEMERINTAH SURIAH DALAM
MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL SURIAH DI KONFLIK SURIAH
PADA TAHUN 2012-2018**

SKRIPSI



Oleh:

Gravenia Rahma Safira

(18323133)

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

**PELANGGARAN HAM OLEH PEMERINTAH SURIAH DALAM
MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL SURIAH DI KONFLIK SURIAH
PADA TAHUN 2012-2018**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

GRAVENIA RAHMA SAFIRA

18323133

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PELANGGARAN HAM OLEH PEMERINTAH SURIAH DALAM
MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL SURIAH DI
KONFLIK SURIAH PADA TAHUN 2012-2018**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Pada Tanggal

26 Juli 2022

مجلس البحوث والدراسات
Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 2 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R
- 3 Gustri Eni Putri, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

26 Juli 2022,

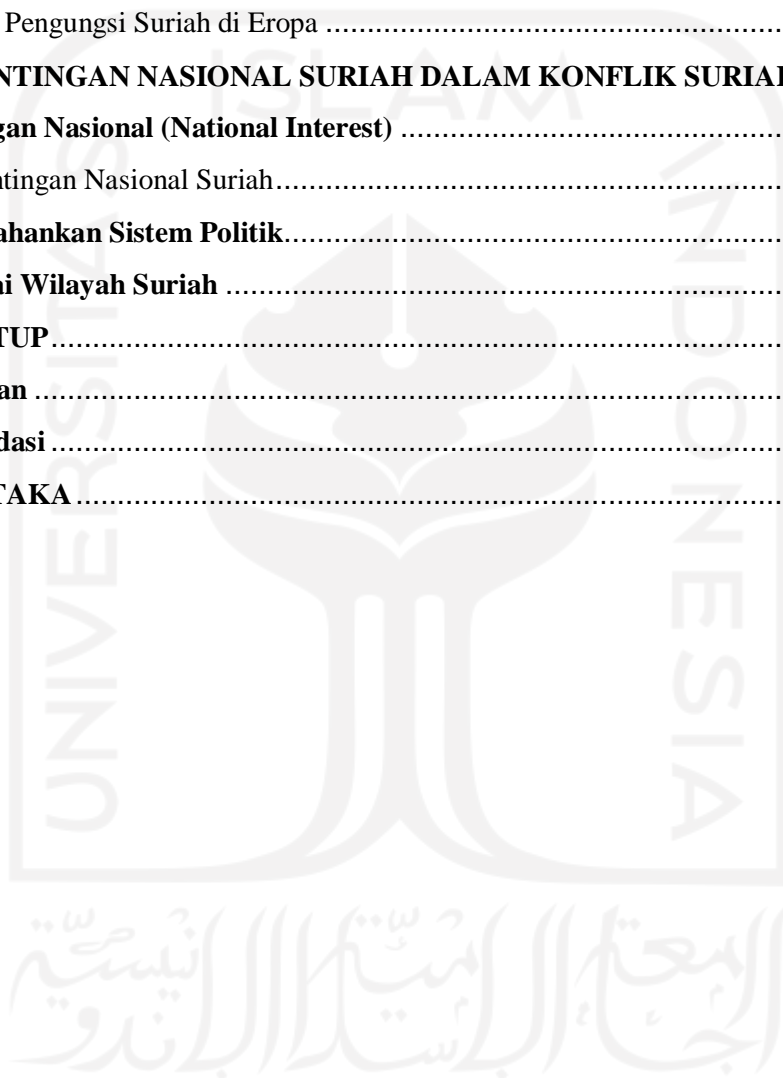


Gravenia Rahma Safira

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Cakupan Penelitian	4
1.5 Tinjauan Pustaka	5
1.6 Kerangka Pemikiran	7
1.7 Argumen Sementara	9
1.8 Metode Penelitian	9
1.8.1 Jenis Penelitian	9
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	10
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	10
1.8.4 Proses Penelitian	10
1.9 Sistematika Pembahasan	11
BAB II DINAMIKA KONFLIK SURIAH	13
2.1 PERANG SAUDARA DI SURIAH	13
2.1.1 Rezim Bashar al-Assad	14
2.1.2 <i>Free Syrian Army</i> (FSA)	15
2.2 KRISIS KEMANUSIAAN DI SURIAH	17

2.2.1 Korban Penyiksaan.....	18
2.2.2 Korban Senjata Kimia.....	22
2.3 Krisis Pengungsi Suriah	28
2.3.1 Turki	30
2.3.2 Krisis Pengungsi Suriah di Eropa	32
BAB III KEPENTINGAN NASIONAL SURIAH DALAM KONFLIK SURIAH.....	34
3.1 Kepentingan Nasional (National Interest)	34
3.1.1 Kepentingan Nasional Suriah.....	34
3.2 Mempertahankan Sistem Politik.....	40
3.3 Menguasai Wilayah Suriah	42
BAB IV PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Rekomendasi	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49



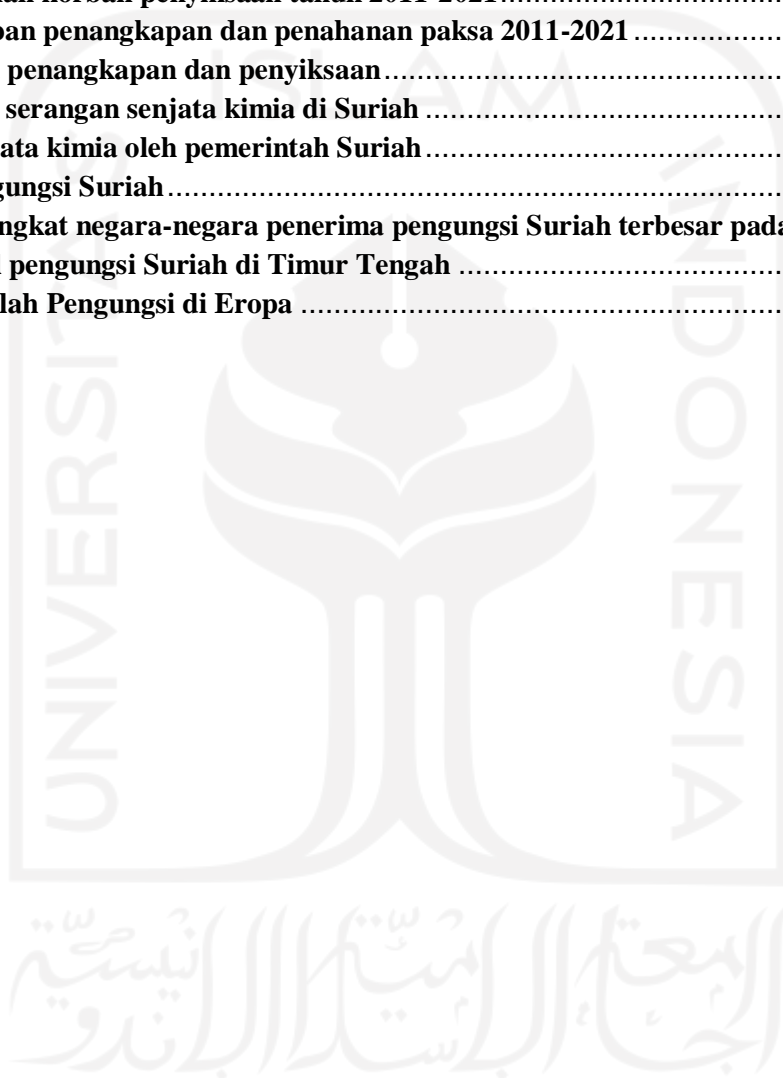
DAFTAR TABEL

Table 1. jumlah korban meninggal di Suriah	23
Table 2. daftar insiden yang diselidiki oleh IIT	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. jumlah korban penyiksaan tahun 2011-2021	19
Gambar 2. korban penangkapan dan penahanan paksa 2011-2021	20
Gambar 3. Peta penangkapan dan penyiksaan	21
Gambar 4. peta serangan senjata kimia di Suriah	25
Gambar 5. Senjata kimia oleh pemerintah Suriah	27
Gambar 6. pengungsi Suriah	29
Gambar 7. Peringkat negara-negara penerima pengungsi Suriah terbesar pada tahun 2020	29
Gambar 8. total pengungsi Suriah di Timur Tengah	31
Gambar 9. Jumlah Pengungsi di Eropa	32



DAFTAR SINGKATAN

CWC: *Chemical Weapons Convention*

FSA: *Free Syrian Army*

FFM: *Fact Finding Mission*

GPPI: *Global Public Policy Initiative*

IIT: *Investigation and Identification Team*

ISIS: *Islamic State of Iraq and the Levant*

OPCW: *Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons*

OHCHR: *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*

SNC: *Syrian National Coalition*

SAA: *Syrian Arab Army*

SNCORF: *Syrian National Coalition for Oposition Revolutionary Force*

SNHR: *Syrian Network for Human Rights*

SOHR: *The Syrian Observatory for Human Rights*

UNSGM: *Secretary-General's Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons*

UNHCR: *United Nations High Commissioner for Refugees*

Abstrak

Konflik Suriah merupakan konflik yang terjadi akibat dampak dari fenomena *Arab Spring*. Konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 dan terjadi antara pihak pemerintah dan pihak oposisi. Konflik Suriah merupakan konflik yang mengakibatkan krisis kemanusiaan terburuk pada abad ke-21. Sejak konflik dimulai pemerintah Suriah secara konsisten menggunakan kekerasan dan juga senjata kimia. Akibat dari tindakan pemerintah Suriah ini memberikan dampak serius bagi warga Sipil Suriah. Rusaknya infrastruktur di Suriah membuat banyak warga Suriah memilih untuk meninggalkan Suriah dan pergi mengungsi. Suriah memiliki alasan dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut yaitu untuk mencapai kepentingan nasional Suriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah. Penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori kepentingan nasional (*National Interest*) yang dikembangkan oleh Scott Burchill. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pemerintah Suriah memiliki beberapa kepentingan nasional yaitu untuk membuat masyarakat yang hegemoni, mengusir kelompok oposisi dari Suriah, mempertahankan sistem politik pemerintah Suriah dan menguasai kembali wilayah teritorial Suriah.

Kata Kunci: Konflik Suriah, Suriah, Kepentingan Nasional

Abstract

The Syrian conflict is a conflict that occurs due to the impact of the Arab Spring phenomenon. The conflict began in 2011 and is between the government and the opposition. The Syrian conflict is a conflict that has resulted in the worst humanitarian crisis of the 21st century. Since the conflict began, the Syrian government has consistently used violence and chemical weapons. The consequences of the Syrian government's actions have a serious impact on Syrian civilians. Damaged infrastructure in Syria makes many Syrians choose to leave Syria and go for refuge. Syria has a reason for taking these actions, namely to achieve Syria's national interests. This study aims to analyze the Syrian national interest in the conflict. This study will analyze the use of the theory of national interest developed by Scott Burchill. In this study, the researcher found that the government has several national interests, namely to create a hegemonic society, oppose opposition groups from Syria, maintain the Syrian government system and regain control of the territorial area.

Keywords: Syrian Conflict, Syria, National Interest

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suriah merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Timur Tengah. Suriah merupakan salah satu negara yang terkena dampak dari fenomena Arab Spring. Fenomena *Arab Spring* mengancam eksistensi rezim pemerintahan Bashar al-Assad yang berjalan secara monarki. Konflik ini dimulai oleh pihak oposisi bersenjata yang menginginkan adanya reformasi pemerintahan Bashar al-Assad yang Monarki (Pontoh, Y, and Supriyatno 2019). Konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi di Suriah dimulai pada tahun 2011. Kerusuhan yang terjadi meningkat antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata di provinsi Daraa sejak bulan juli 2011.

Pemerintah Suriah terus melancarkan serangan melalui udara dan serangan rudal yang banyak memakan korban warga sipil. kekerasan yang terjadi di Suriah semakin meningkat ketika banyak pihak yang mulai terlibat dalam konflik Suriah. Salah satunya adalah masyarakat sipil yang bergabung ke dalam pihak oposisi. Aksi demonstrasi yang terjadi di kota deraa menelan korban sipil yang cukup banyak termasuk anak-anak (Fitria 2012). Salah satu kelompok bersenjata FSA merupakan kelompok angkatan bersenjata Suriah yang dibentuk pada tahun 2011 dan berbasis di Turki. FSA merupakan kelompok tentara utama pihak oposisi yang memiliki lebih dari 100.000 anggota (Tasnur and Wati 2019).

Dalam konflik Suriah Pemerintah Suriah telah terbukti dalam menggunakan senjata kimia sebagai alat untuk melemahkan pihak musuh. Dengan menggunakan senjata kimia ini maka pemerintah Suriah telah melanggar hukum humaniter internasional. Senjata kimia merupakan salah satu senjata yang dilarang oleh hukum internasional, komunitas internasional juga telah

melakukan penyelidikan dan menemukan bukti terhadap penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah. Laporan mengenai penggunaan senjata kimia muncul pada tahun 2012 atau satu tahun setelah konflik Suriah dimulai. Pada tahun 2013 jumlah laporan mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah mulai meningkat sehingga masyarakat internasional meminta UN *Secretary-General's Mechanism* (UNSGM) untuk menyelidiki kasus dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah (Becker-Jakob 2019). Akibat dari serangan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah ini banyak warga sipil yang menjadi korban. *Global Public Policy Institute* (GPPI) melaporkan bahwa lebih dari 60% kematian dan 50% cedera serius akibat serangan sarin di Ghouta timur pada tahun 2013. Serangan senjata kimia juga memaksa warga sipil untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi (Haviland 2021). Serangan kimia yang terakhir dilakukan oleh pemerintah Suriah terjadi di Douma, Damaskus pada tahun 2018. *Human Rights Watch* melaporkan bahwa sejak tahun 2012 pemerintah Suriah telah melakukan 85 serangan senjata kimia (Arms Control Association 2021).

Selain senjata kimia pemerintah Suriah juga melakukan kekerasan. Pemerintah Suriah memilih untuk menggunakan kekerasan untuk menghentikan para demonstran. Jumlah korban warga sipil yang cukup besar ini menjadikan konflik Suriah sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di abad ke 21 (BBC 2014). Konflik ini juga mengakibatkan banyak infrastruktur seperti rumah sakit, perumahan penduduk hingga tempat ibadah hancur tidak tersisa. Akibatnya masyarakat Suriah yang kehilangan tempat tinggal terpaksa untuk keluar dari negaranya dan mencari tempat tinggal baru. Konflik Suriah memberikan dampak yang semakin serius kepada warga sipil ketikan masyarakat yang terpaksa mengungsi mendapatkan permasalahan lain di negara tetangga. Beberapa titik pengungsian yang terdapat di negara tetangga seperti Turki sempat mengalami kericuhan akibat kondisi kamp yang tidak sesuai. Aksi protes ini dikarenakan kondisi

sanitasi yang memprihatinkan dan sulitnya akses air bersih. Negara penerima juga seringkali merasa kesulitan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengungsi. Laju pengungsi yang semakin meningkat setiap harinya mengakibatkan sejumlah kamp pengungsian mengalami kelebihan populasi. Isu pengungsi sangat mempengaruhi sistem stabilitas internasional serta memberikan dampak negatif kepada negara penerima dan juga warga setempat (Nasser-Eddine 2012).

Pengungsi Suriah juga mengalami beberapa kendala di negara tujuan seperti kondisi kamp yang buruk, dokumentasi yang tidak lengkap, dan sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan (BBC, n.d.). selain Turki Eropa juga menjadi kawasan tujuan pengungsi Suriah. Menurut UNHCR selain Turki, Lebanon dan Yordania juga merupakan negara yang menerima cukup banyak pengungsi Suriah. Eropa menampung lebih dari 1 juta pengungsi Suriah, dengan Jerman menjadi negara penampung terbanyak di kawasan Eropa. selain Jerman, Swedia juga menjadi negara tujuan bagi pengungsi Suriah. Menurut laporan *Institute on Statelessness* Suriah telah menjadi negara asal pencari suaka dengan jumlah terbesar di Uni Eropa sejak tahun 2013 (European Commission 2021b). Penelitian ini penting untuk dilakukan karena konflik Suriah merupakan konflik yang menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk pada abad ke-21. Serangkaian pelanggaran Hak Asasi Manusia dilakukan oleh pemerintah Suriah kepada pihak oposisi maupun warga sipil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Suriah Memperjuangkan Kepentingan Nasionalnya melawan *Free Syrian Army*?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pelanggaran oleh pemerintah Suriah dalam memperjuangkan kepentingan nasional Suriah di konflik Suriah pada tahun 2012-2018, memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui upaya Suriah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya
2. Mengetahui kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah

1.4 Cakupan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan batasan dalam pembahasan agar tidak terlalu luas. *United Nations High Commissioner for Human Rights* melaporkan pada tanggal 24 September 2021, bahwa 350.209 telah diidentifikasi tewas dalam konflik Suriah antara maret 2011 hingga maret 2021 (SNHR 2022). Dalam penelitian ini penulis menetapkan tahun 2012-2018 sebagai cakupan waktu penelitian. Pemilihan tahun 2012 didasarkan pada laporan yang dilakukan oleh kementerian luar negeri Suriah pada tanggal 23 Juli 2012. Kementerian luar negeri Suriah untuk pertama kalinya mengkonfirmasi bahwa Suriah memiliki senjata kimia. pada tanggal 23 Desember 2012 rezim Assad dilaporkan menggunakan senjata kimia jenis gas beracun di Homs. Peristiwa ini menewaskan 7 warga sipil Suriah. gas beracun tersebut juga memberikan efek samping seperti mual, hingga kesulitan bernafas (Arms Control Association 2021). Pada tanggal 7 April 2018 Suriah terbukti menggunakan senjata kimia jenis Klorin di Dhouma. Laporan mengenai

penggunaan senjata kimia di Suriah dilakukan oleh OPCW pada bulan Juli 2018. Serangan ini merupakan serangan terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Dalam penelitian ini penulis juga akan menetapkan batasan dalam pembahasan kelompok oposisi di Suriah. Dalam penelitian ini kelompok oposisi yang akan penulis bahas yaitu *Free Syrian Army* (FSA). FSA merupakan kelompok senjata terbesar dalam pihak oposisi. FSA dibentuk tahun 2011 dan memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Suriah.

1.5 Tinjauan Pustaka

Literatur yang pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Syarif Bahaudin Mudore dan Nurlaila Safitri. Literatur yang berjudul *Dinamika perang Suriah: Aktor dan Kepentingan* ini mengkaji mengenai aktor yang terlibat dalam konflik Suriah. Literatur ini juga membahas mengenai kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor yang terlibat dalam konflik Suriah. Penulis menggunakan Teori hegemoni dan kepentingan nasional dalam literatur ini. Penulis menyimpulkan bahwa aktor yang terlibat dalam konflik Suriah memiliki hegemoni dan kepentingan nasional masing-masing. Penulis juga menjelaskan mengenai kepentingan pihak oposisi dan negara pendukung pihak oposisi (Mudore and Safitri 2019). Literatur ini membahas kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Suriah secara luas. Literatur ini tidak membahas secara spesifik mengenai kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah dan cenderung membahas kepentingan aktor lain yang terlibat. Literatur akan berfungsi sebagai pembandingan dari penelitian ini yang akan membahas mengenai kepentingan nasional Suriah.

Literatur selanjutnya merupakan jurnal yang berjudul *analisis kekerasan terhadap perang di Suriah dalam perspektif konflik Johan Galtung* (2011-2017). Dalam literatur ini penulis menganalisis bagaimana konflik Suriah terjadi dengan menggunakan tipologi Galtung. Dalam

jurnal yang ditulis oleh Jovita Pontoh, I Gede Sumertha K Y, dan Makmur Supriyatno ini menyatakan bahwa Suriah memiliki tingkat kekerasan langsung, struktural dan kultural yang besar. Jurnal ini juga menyatakan bahwa Suriah merupakan pihak yang memberikan kekerasan paling dominan saat perang terjadi. Penulis juga menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi diakibatkan oleh faktor internal dan pengaruh politik internasional (Pontoh, Y, and Supriyatno 2019). Literatur ini juga menjelaskan mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap pihak oposisi maupun warga sipil. Tetapi jurnal ini tidak menjelaskan secara jelas mengenai kepentingan nasional Suriah dalam melakukan kekerasan tersebut.

Literatur selanjutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Samuel Clementh Pasaribu. Jurnal yang berjudul analisis yuridis mengenai tanggung jawab pemerintah Suriah terhadap penggunaan gas sarin dalam penyerangan kota Khan Syakhkhun di Suriah berdasarkan hukum humaniter internasional ini membahas mengenai tindakan pemerintah Suriah dalam menggunakan senjata kimia di konflik Suriah. Literatur ini menyatakan bahwa tindakan pemerintah Suriah telah melanggar hukum Humaniter internasional. Literatur ini juga menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah Suriah bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Literatur ini menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak bersedia mengadili pelaku sebagaimana tercantum dalam hukum internasional (Clementh, n.d.). Literatur ini membahas mengenai penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, tetapi tidak membahas mengenai kepentingan Suriah dalam melakukan serangan tersebut. Sehingga pembahasan dalam penelitian ini akan berbeda karena penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan nasional Suriah dalam menggunakan senjata kimia di konflik Suriah.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kepentingan Nasional (*National Interest*)

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori kepentingan nasional yang dikembangkan oleh Scott Burchill. Konsep ini menjadi kunci dalam pendekatan realisme yang sangat percaya bahwa negara merupakan satu-satunya aktor atau entitas dalam Hubungan Internasional. Dalam bukunya yang berjudul *The National Interest in International Relations Theory*, Scott Burchill melakukan analisis mengenai konsep kepentingan nasional dalam realisme. Realisme merupakan teori yang memiliki pendapat bahwa pada dasarnya negara dan manusia memiliki sifat agresif dan egosentrik dalam memperoleh kekuasaan. Dalam situasi anarkis negara mengambil langkah militer untuk memperjuangkan kekuasaannya. Realisme memberikan konsep seperti kepentingan nasional, kedaulatan negara, kekuatan nasional dan integritas nasional dalam mempertahankan kekuasaan (Burchill 2005).

Realisme mencoba untuk melihat dan menjelaskan politik internasional yang “apa adanya”. Tujuan utama realisme yaitu keberlangsungan hidup negara yang mana hal ini menjadi alasan tindakan negara selalu didasarkan kepada kepentingannya. Teori realisme memiliki empat prinsip utama: (a) sifat dasar manusia yang dipandang secara pesimis, (b) hubungan internasional pada dasarnya menyelesaikan konflik dengan cara berperang, (c) kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional merupakan tujuan utama (*national security and state survival*), (d) politik internasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan politik domestik.

Menurut pandangan realis Keputusan suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan keamanannya sendiri biasanya dengan melemahkan keamanan pihak lain. Peningkatan keamanan merupakan langkah untuk bertahan hidup yang mana menjadi tujuan utama negara. ketika

keamanan suatu negara telah tercapai maka tujuan lain seperti keuntungan, kekuasaan dan ketentraman menjadi penting. Kebijakan luar negeri negara biasanya dipengaruhi oleh kebijakan domestik dan program domestik sering menjadi bagian penting dari proses keputusan. Realisme politik dalam menganalisis hubungan internasional akan selalu berdasar kepada realitas (Morgenthau 2010).

Pandangan ini melihat bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan negara. Negara merupakan entitas politik tertinggi di masyarakat dan anarkisme dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi oleh negara. Oleh karena itu negara merupakan satu-satunya aktor dalam politik internasional. Kepentingan nasional merupakan kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki. Menurut Burchill perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “power” yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya didalam masyarakat internasional.

Dalam konsep ini politik luar negeri harus bisa membangkitkan “ketakutan” dari negara lain sehingga mereka tidak berani melakukan serangan atau memberikan ancaman terhadap negara lain. Dalam perspektif ini struktur internasional yang anarkis menjadi kata kunci untuk menjelaskan peran negara (Burchill 2005). Konsep kepentingan nasional diposisikan untuk melihat tujuan Suriah dalam konflik Suriah. kepentingan nasional sangat erat hubungannya dengan power suatu negara sebagai tujuan maupun instrumen. Keputusan luar negeri suatu negara hanya akan mengakui negara sebagai satu-satunya entitas tertinggi. Oleh karena itu negara merupakan satu-satunya aktor dalam konsep ini (Burchill 2005).

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini penulis menetapkan argumen sementara bahwa Suriah melakukan serangkaian pelanggaran perang dan kejahatan manusia didasarkan pada kepentingan nasionalnya. teori kepentingan nasional digunakan untuk menganalisis kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah. konsep kepentingan nasional menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan negara. Oleh karena itu negara negara merupakan entitas tertinggi dalam politik internasional. Dalam konflik ini pemerintah Suriah melakukan pelanggaran HAM seperti melakukan kekerasan dan menggunakan senjata kimia sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya. Akibat dari tindakan pemerintah Suriah ini menyebabkan Suriah mengalami krisis kemanusiaan terburuk dalam satu dekade terakhir.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berkaitan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan orang yang diteliti dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Menurut Creswell (2012), penelitian kualitatif adalah sarana untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul; pengumpulan data di setting peserta; menganalisis data secara induktif, membangun dari tema khusus ke tema umum; dan membuat interpretasi makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur penulisan yang fleksibel. Menurut Creswell (2012) juga, metode kualitatif dibagi menjadi lima jenis, yaitu penelitian fenomenologis, grounded theory, etnografi, studi kasus dan penelitian naratif.

I.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian yaitu Suriah sebagai aktor utama. Pemerintah Suriah dianggap telah melakukan kekerasan terhadap warga negara suriah yang menentang pemerintahan Bashar al-Assad. Sementara objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu; kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah.

I.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Data yang diperoleh akan dikumpulkan melalui berbagai macam sumber atau dokumen-dokumen tertulis. Menurut Creswell metode ini disebut dengan metode Studi Kasus (*Case-Study*) yang mana merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dalam rangka mendalami suatu kasus. Dengan metode ini penulis dapat meneliti dan menangkap kesulitan kasus tersebut. metode ini hanya meneliti satu kasus yang spesifik. Metode Studi Kasus dapat membantu peneliti untuk memahami lebih dalam suatu organisasi, kelompok, negara hingga perorangan.

I.8.4 Proses Penelitian

Dalam penelitian kualitatif selalu dimulai dengan pemilihan topik penelitian atau mengidentifikasi suatu masalah. Setelah topik ditemukan maka topik akan dikembangkan menjadi suatu isu yang lebih spesifik. Setelah topik yang spesifik ditemukan maka dilanjutkan dengan mencari buku-buku atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik tersebut. setelah hasil dari bacaan buku-buku dan jurnal ilmiah di lakukan oleh penulis maka dilanjutkan dengan mengidentifikasi tujuan utama peneliti dalam penelitiannya. Setelah menemukan tujuan penelitian

maka dilakukan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan maka data yang tersedia akan dianalisis dalam bentuk teks. Data yang dikumpulkan akan diklasifikasi menjadi satu ide utama. Tahap terakhir dari penelitian kualitatif yaitu penulisan laporan. Penelitian kualitatif memiliki sifat yang deskriptif oleh karena itu penelitian kualitatif akan menghasilkan suatu laporan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berikut digunakan untuk memudahkan peneliti dalam mengikuti seluruh uraian dan pembahasan atas penelitian ini.

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara umum mengenai latar belakang kasus yang diangkat, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian ini, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, signifikansi penelitian, landasan teori dan metode penelitian.

BAB II: Perang Saudara di Suriah.

Dalam bab ini penulis akan membahas terkait dengan latar belakang terjadinya krisis kemanusiaan di Suriah. Penulis juga menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berkonflik dalam konflik Suriah. Pada bab ini Penulis juga akan menjabarkan data mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di Suriah.

BAB III: kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah menurut teori realisme klasik

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah. Kepentingan nasional Suriah akan dibahas menggunakan teori kepentingan nasional oleh Scott Burchill untuk menganalisis kepentingan nasional Suriah.

BAB IV: Penutup

Bab ini berisi penutup yang akan terdiri dari kesimpulan hingga daftar pustaka. Dalam penelitian ini akan disimpulkan mengenai kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah.



BAB II

DINAMIKA KONFLIK SURIAH

2.1 PERANG SAUDARA DI SURIAH

Konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 di kota selatan Deraa setelah adanya insiden penangkapan dan penyiksaan beberapa remaja yang melakukan aksi revolusioner. Pihak pemerintah terus menggunakan kekuatan militer untuk menekan para demonstran yang terus menyebar di Suriah. Kerusakan yang terjadi memicu protes untuk menuntut pengunduran diri presiden Bashar al-Assad (BBC, 2016). Penggunaan senjata oleh pihak pemerintah membuat pihak oposisi juga akhirnya mulai mengangkat senjata untuk mengusir pasukan keamanan dari wilayah mereka. Kekerasan di Suriah semakin meningkat saat pihak oposisi membentuk pasukan untuk memerangi pasukan pemerintah. Pihak oposisi juga berambisi untuk menguasai kota-kota dan pedesaan. Pertempuran pihak pemerintah dan pihak oposisi dimulai di kota Damaskus dan di kota Aleppo. Pada tahun 2013 PBB menyatakan bahwa setidaknya 90.000 orang telah tewas dalam konflik tersebut, pada Agustus 2015 angka tersebut meningkat menjadi 250.000 (BBC, 2016).

Kelompok Oposisi Suriah terdiri dari kelompok yang tergabung dalam *Free Syrian Army* (FSA) dan SNC atau yang lebih dikenal sebagai *Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Force* (SNCORF) terus berupaya menggulingkan rezim Assad (Herlambang 2018). Kelompok Oposisi mendapat dukungan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat yang terus mendesak PBB untuk menghentikan rezim pemerintahan Bashar al-Assad. Dalam perang saudara di Suriah terdapat beberapa pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat yaitu Rezim pemerintah, kelompok Oposisi, dan Pihak asing dan Jihadis, setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingannya masing-masing. Kelompok pemerintahan yang dipimpin oleh Bashar al-Assad memiliki kepentingan untuk merebut kembali kekuasaan di seluruh negeri Suriah. Pihak

pemerintah memiliki 300.000 kelompok militer angkatan darat. Kelompok Oposisi yang terdiri dari kelompok bersenjata dan pemberontak memiliki kepentingan untuk melengserkan rezim Bashar al-Assad (Mudore and Safitri 2019).

2.1.1 Rezim Bashar al-Assad

Keluarga al-Assad telah mengendalikan pemerintahan Suriah sejak tahun 1970. Suriah masih belum menerapkan sistem demokrasi dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Tetapi pemerintah Suriah menyebut negaranya sebagai negara Republik Arab Suriah. Negara Suriah menjalankan pemerintahannya secara otoriter yang sebagian besar kekuatannya merupakan militer. Anggota keluarga Assad sering memegang jabatan tinggi dalam pemerintahan dan juga militer di Suriah. Banyaknya warga Suriah yang tidak puas dengan tingginya tingkat pengangguran, korupsi yang meluas dan kurangnya kebebasan politik menjadi salah satu terjadinya gerakan revolusi. Terjadinya fenomena *Arab Spring* menjadi salah satu motivasi bagi warga Suriah untuk melakukan gerakan revolusi (Tan and Perudin 2019).

Dalam menanggapi para demonstran yang meminta adanya revolusi, Bashar al-Assad berjanji akan membawa reformasi dalam pemerintahan Suriah, tetapi Assad menolak untuk melakukan perubahan rezim. Dengan adanya dukungan Rusia dan Iran, Rezim Assad semakin yakin untuk berpegang teguh dalam keputusannya dan bersedia melakukan apa saja untuk mempertahankan pemerintahannya. Rezim Assad merupakan pemain penting dan kuat dalam konflik Suriah. Tujuan utama rezim Assad yaitu untuk mengalahkan pemberontak dan oposisi. Rezim Assad juga memiliki tujuan untuk membangun dan mendapatkan kembali pengaruh atas seluruh wilayah Suriah menggunakan cara politik, diplomatik dan militer. Rezim Assad menggunakan cara apa saja untuk mendapatkan kepentingannya seperti mengerahkan *Syrian Arab Army* (SAA) dan pasukan paramiliter dalam menekan para pengunjuk rasa. Dengan menggunakan

kekerasan untuk melemahkan pihak oposisi, maka adanya tindakan balasan dan perlawanan dari pihak oposisi menyebabkan militerisasi konflik. Rezim Assad berhasil mengalahkan kelompok oposisi dan berhasil menaklukkan militer di berbagai wilayah strategis. Rezim Assad berhasil merebut kembali Aleppo di tahun 2016 dan pada tahun 2018 Suriah berhasil merebut sebagian besar wilayah di Suriah Selatan (Mirza, Abbas, and Qaisrani 2021).

2.1.2 *Free Syrian Army (FSA)*

Kelompok oposisi mulai muncul pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menyingkirkan rezim Bashar al-Assad. Tindakan kekerasan yang dilakukan pihak pemerintah untuk menekan pihak oposisi membuat pihak oposisi melakukan perlawanan. Perlawanan ini menimbulkan konflik dan mengakibatkan kematian dan kehancuran infrastruktur (Mirza, Abbas, and Qaisrani 2021). Kelompok oposisi dalam konflik Suriah salah satunya adalah FSA (*Free Syrian Army*). FSA merupakan kelompok bersenjata yang berasal dari kelompok militer Assad yang membelot dan juga terdiri dari beberapa masyarakat sipil. FSA memiliki kepentingan untuk menggulingkan rezim Assad.

FSA merupakan kelompok bersenjata terbesar dalam kelompok oposisi. FSA dibentuk pada tahun 2011 dan mayoritas anggotanya adalah orang Arab Sunni tetapi kelompok FSA juga mencakup batalyon yang terdiri dari Kurdi, Turkmenistan, Palestina, dan Druze. FSA menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan militer yang memiliki tanggung jawab untuk menggulingkan pemerintahan Suriah. FSA juga menyatakan bahwa kelompok ini terdiri dari warga Suriah yang memiliki satu tujuan terlepas dari agama, etnis dan tradisi berbeda (Benammar 2013). Pada awalnya inti dari FSA yaitu terdiri dari sekelompok kecil tentara yang melakukan desersi. Popularitas FSA secara pesat meningkat saat pihak pemerintah Suriah meningkatkan

tindakan kerasnya yang mematikan terhadap para demonstran. Sejak saat itu FSA mulai merekrut warga sipil yang memiliki pengetahuan mengenai senjata api (Spyer et al. 2017).

FSA dianggap sebagai fasilitator bagi sebagian kelompok kecil yang ingin menjadi bagian dari pihak oposisi. Terbukanya FSA kepada warga sipil menjadikannya sebagai suatu kelompok yang tumbuh besar secara pesat. Awal mula dibentuknya FSA yaitu sebagai pelindung dan pembela warga sipil yang melakukan protes kepada pemerintah Suriah. Seiring berjalannya waktu FSA memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dan menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pada tahun 2011 hingga 2012 FSA dipimpin oleh kolonel Riad al-Asad seorang mantan perwira Angkatan Udara Suriah yang membelot pada tahun 2011. Pusat komando FSA pada awalnya berbasis di Turki dekat perbatasan Suriah. FSA mendapatkan dukungan dari beberapa negara salah satunya adalah Turki. FSA terdiri dari batalyon kecil yang terlokalisasi dari seluruh Suriah. Batalyon-batalyon ini cenderung berperang di wilayah geografis kecil untuk mempertahankan kampung halaman mereka (O'Bagy 2013).

FSA mendapatkan bantuan finansial, materil sejak tahun 2012. Beberapa negara barat dan Arab pendukung pihak oposisi juga memberikan bantuan dana kepada FSA. Pada tahun 2012 Amerika Serikat dan Inggris memberikan bantuan senjata kepada FSA. Selain itu AS juga memberikan pelatihan militer kepada tentara FSA. Pada tahun 2013 Inggris juga membantu dalam melatih dan melengkapi 100.000 tentara pemberontak Suriah unruk mengalahkan pemerintah Suriah (Sengupta and Morris 2013). Inggris bersedia memasok senjata, mobil militer berlapis baja dan keperluan militer lainnya kepada FSA. Selain Inggris, AS juga memasok perlengkapan perang seperti baju pelindung dan juga mobil militer kepada FSA, selain perlengkapan militer AS juga mengirim bantuan kemanusiaan secara langsung (Elgot 2018).

2.2 KRISIS KEMANUSIAAN di SURIAH

Krisis kemanusiaan di Suriah diawali dari adanya perang saudara yang berkepanjangan. Konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi di Suriah dimulai sejak tahun 2011. Kerusuhan yang terjadi meningkat antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata di provinsi Daraa sejak bulan juli 2011. Pemerintah Suriah terus melancarkan serangan melalui udara dan serangan rudal yang menelan banyak korban. Sejak konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok oposisi di Suriah dimulai pada 2011 setidaknya 580.000 orang telah tewas. Komisi penyelidikan yang dimandatkan oleh dewan hak asasi manusia PBB di Suriah telah melaporkan setidaknya lebih dari 130.000 korban penahanan, penculikan dan penghilangan sejak 2011, dengan mayoritas disebabkan oleh pemerintah Suriah. lebih dari 13 juta orang telah mengungsi dan diperkirakan 13,4 juta warga Suriah masih membutuhkan bantuan (Fahham and Kartaatmaja 2014).

United Nation High Commissioner for Human Rights (UNHCR) melaporkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 600.000 warga Suriah memilih untuk pergi meninggalkan negaranya. Krisis Suriah merupakan krisis kemanusiaan terbesar sejak tahun 1945. Menurut UNHCR pada tahun 2014 hampir 60 juta warga Suriah pergi meninggalkan Suriah karena adanya kekerasan dan juga penganiayaan. Menemukan solusi dalam mengatasi isu pengungsi Suriah masih menjadi agenda jangka panjang bagi masyarakat Internasional. Upaya-upaya seperti bantuan kemanusiaan, menyediakan dana dan juga menyediakan tempat tinggal telah dilakukan oleh organisasi internasional (Ferris and Kirişci 2016).

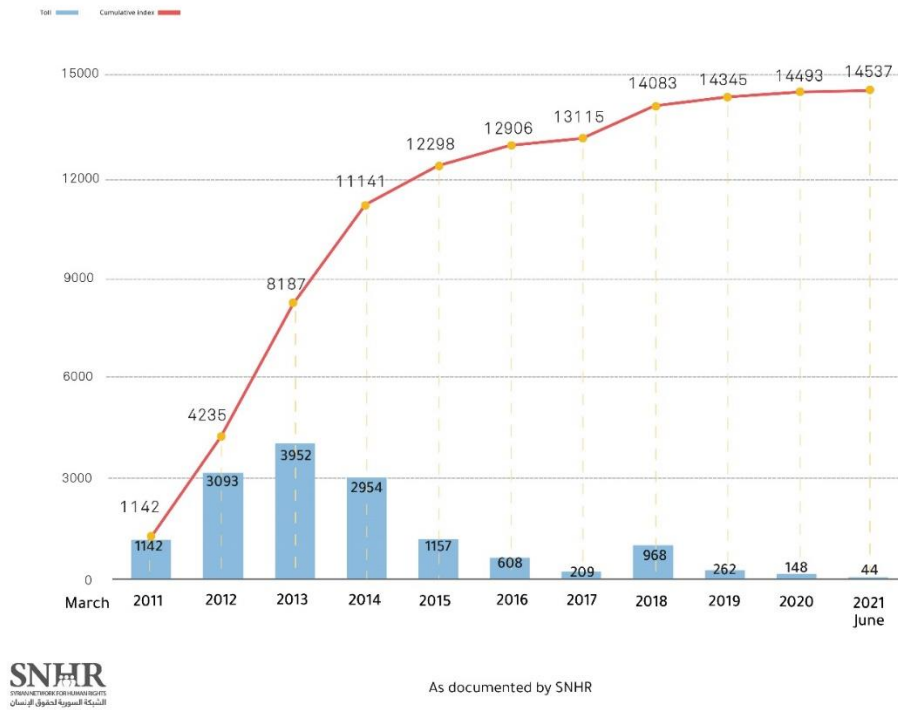
2.2.1 Korban Penyiksaan

Pemerintah Suriah melakukan setidaknya 72 jenis penyiksaan terhadap tahanan di penjara Suriah. Menurut laporan *Syrian Network for Human Rights* (SNHR), pemerintah Suriah telah mengakibatkan sedikitnya lebih dari 14.000 tewas selama konflik berlangsung. Bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Suriah seperti kekerasan seksual, melakukan mutilasi, pengabaian medis dan lain-lain. Pemerintah Suriah secara konsisten membantah tuduhan mengenai penyiksaan tersebut. Suriah telah meratifikasi konvensi internasional yang menentang penyiksaan pada tahun 2004 sebagai bagian dari kebijakan Bashar al-Assad. SNHR melaporkan bahwa setidaknya 14.000 orang telah disiksa sampai meninggal dunia oleh pemerintah Suriah. sekitar 1,2 juta warga Suriah atau satu dari 18 populasi ditangkap dan ditahan secara paksa oleh pemerintah Suriah. Selama konflik terjadi setidaknya 127.000 orang diperkirakan meninggal dalam penjara Suriah (SNHR, 2019).

Syrian Network for Human Rights (SNHR) mengeluarkan laporan mengenai warga Suriah yang menjadi korban akibat penyiksaan oleh pihak yang berkonflik. Selama konflik terjadi penyiksaan banyak dilakukan oleh pihak yang berkonflik terutama pihak pemerintah Suriah. Pasal 1 Konvensi PBB tahun 1948 menyatakan istilah penyiksaan yaitu tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah baik fisik maupun mental dengan sengaja dikenakan kepada seseorang untuk memperoleh informasi atau pengakuan. Selain itu menghukum, memaksa dan mengintimidasi seseorang juga merupakan tindakan penyiksaan (SNHR 2021). SNHR melaporkan setidaknya kematian warga Suriah akibat penyiksaan menyentuh angka 14.537 termasuk 180 anak-anak dan 92 wanita dalam rentan tahun 2011 hingga 2021.

Gambar 1. jumlah korban penyiksaan tahun 2011-2021

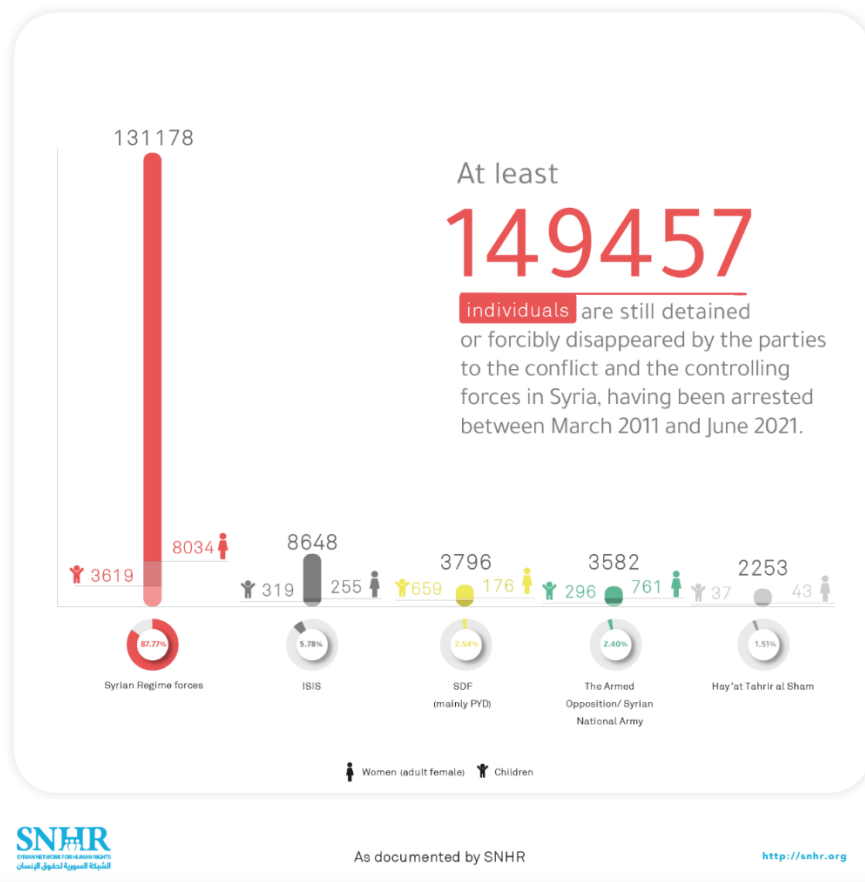
14537 individuals died due to torture at the hands of the parties to the conflict and the controlling forces in Syria From March 2011 to June 2021



Sumber: *Syrian Network for Human Rights* (SNHR) (2021)

Pemerintah Suriah merupakan pihak utama yang melakukan pelanggaran ini. Pemerintah Suriah bertanggung jawab setidaknya 87% dari kasus penangkapan dan penahanan secara paksa. Pemerintah Suriah tidak melakukan identifikasi saat melakukan tindakan penangkapan dan penahanan paksa. Penahanan ini dilakukan kepada warga Suriah yang memiliki hubungan dengan pihak oposisi. Penangkapan dilakukan secara acak sehingga warga sipil yang tidak bersalah juga menjadi korban dari aksi pemerintah Suriah. SNHR melaporkan setidaknya terdapat 7.706 kasus penangkapan secara paksa pada tahun 2018, dan angka ini semakin meningkat setiap tahunnya (SNHR, 2019).

Gambar 2. korban penangkapan dan penahanan paksa 2011-2021



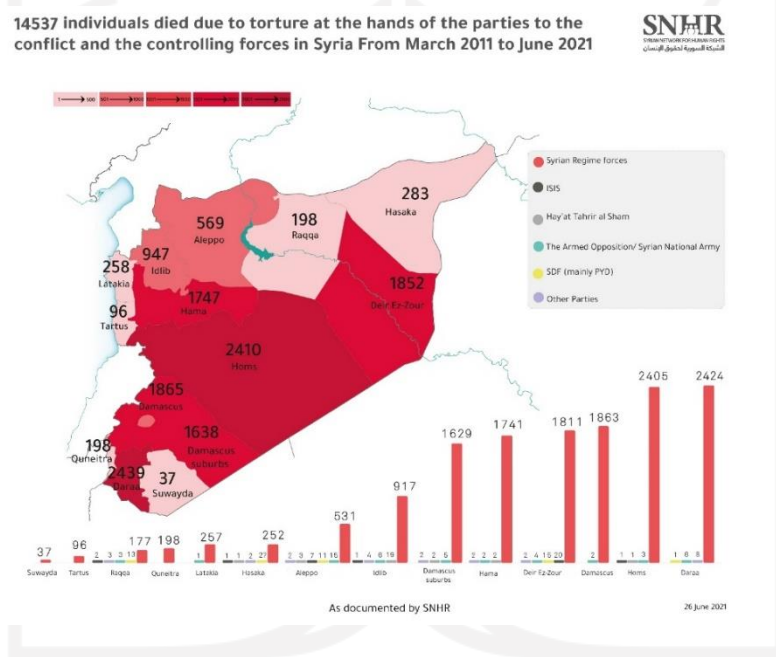
Sumber: SNHR (2021)

Berdasarkan tabel diatas Pemerintah Suriah merupakan pihak yang paling banyak bertanggung jawab atas penahanan dan penculikan secara paksa. Sejak tahun 1970, rezim Suriah telah mengendalikan Majelis Rakyat melalui Partai Ba'ath, dan mengakhiri otoritas kehakiman dengan mengendalikan Dewan Kehakiman Tertinggi, memberlakukan persyaratan bahwa presiden dewan harus menjadi Presiden Republik, dan bahwa Presiden Republik menunjuk hakim Mahkamah Konstitusi Agung.

Rezim Suriah memiliki kendali mutlak atas ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan kekuasaan eksekutif memegang kendali penuh atas dua kekuasaan lainnya dan

dengan kekuasaan otoritas ini terkonsentrasi secara eksklusif di tangan pemerintah Suriah. Monopoli kekuasaan ini memberikan rezim Suriah kesempatan untuk membuat hukum yang diinginkannya, tidak peduli seberapa terang-terangnya bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, dan menyebutnya hukum. Rezim Suriah tidak hanya mempraktikkan penyiksaan, tetapi juga memberlakukan undang-undang yang memberikan kekebalan penuh dari penuntutan kepada mereka yang melaksanakan perintahnya (SNHR 2021).

Gambar 3. Peta penangkapan dan penyiksaan



Sumber: SNHR

Berdasarkan peta diatas semua penangkapan dan penyiksaan dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah. Daraa merupakan wilayah yang dikuasai oleh *Free Syrian Army* pada tahun 2014. Saat ini kota Daraa dikuasai oleh pihak pemerintah Suriah melalui sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh warga Daraa dan ditengahi oleh Rusia. Kota Daraa dan Homs menjadi kota dengan korban penangkapan dan penyiksaan terbanyak dalam rentan tahun 2011-2021.

2.2.2 Korban Senjata Kimia

Laporan mengenai penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah mulai muncul pada tahun 2012 tidak lama sejak perang sipil dimulai. Komunitas internasional berupaya untuk membuktikan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah (Becker-Jakob 2019). Pada awalnya Suriah bukan merupakan pihak dalam CWC (*Chemical Weapons Convention*). Sehingga penyelidikan dilakukan oleh *Nations Secretary-General's Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons* (UNSGM) di bawah wewenang Majelis Umum PBB dan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. UNSGM memulai misi di Damaskus pada tanggal 18 Agustus 2013 untuk menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia di Khan al-Asal, Sheikh Massoud dan Saraqib (Koblentz 2019).

Dalam misi tersebut UNSGM menemukan adanya penggunaan sarin dalam skala besar di Ghouta pinggiran Damaskus pada tanggal 21 Agustus. Berdasarkan analisis sampel lingkungan dan biomedis, analisis pecahan amunisi, wawancara dengan petugas kesehatan, korban dan saksi mata, UNSGM menyimpulkan bahwa senjata kimia digunakan dalam empat kasus termasuk serangan pada tanggal 21 Agustus di Ghouta. Serangan tersebut mengakibatkan lebih dari 1.000 kematian, tetapi mandat UNSGM tidak mengungkapkan pihak yang bertanggung jawab atas serangan-serangan ini (Koblentz 2019).

Setelah Suriah bergabung dengan CWC pada tahun 2013 investigasi penggunaan senjata kimia berada di bawah yurisdiksi *Organization of Prohibited Chemical Weapon* OPCW. CWC mendefinisikan senjata kimia sebagai amunisi dan perangkan yang dirancang khusus untuk melepaskan gas beracun yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan permanen. pada bulan April 2014 OPCW melaporkan tentang bom barel berisi klorin yang dijatuhkan dari helikopter ke kota-kota yang dikuasai oleh pihak oposisi. Akibat dari serangan ini OPCW membentuk tim *Fact-*

Finding Mission (FFM) (Hart, Verbruggen, and Maletta 2017). FFM melakukan investigasi dengan mengunjungi lokasi dugaan insiden untuk melakukan wawancara. FFM juga mengumpulkan catatan medis, mengumpulkan sampel biomedis, serta menganalisis amunisi atau sisa amunisi yang digunakan untuk melakukan serangan.

Table 1. jumlah korban meninggal di Suriah

TAHUN	Pasukan anti-pemerintah	Warga Sipil	Total (termasuk yang tidak teridentifikasi)
2011	619	3,968	7,841
2012	9,746	19,924	49,361
2013	18,914	22,806	73,929
2014	32,803	18,038	76,268
2015	23,601	13,021	54,574
2016	23,431	14,100	52,589
2017	14,064	13,369	34,700
2018	8,663	6,776	20,130
2019	4,727	3,488	11,244
2020	2,693	1,528	6,817

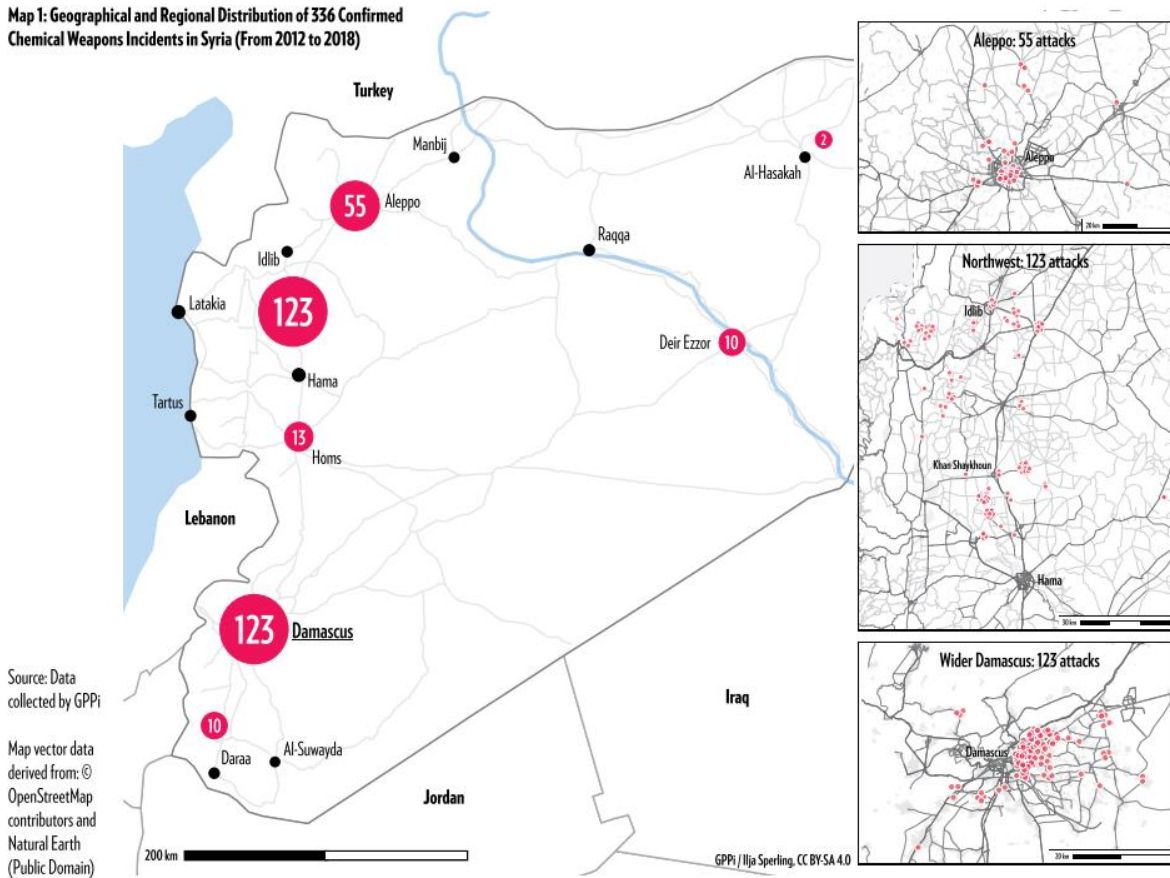
2021	1,238	1,558	3,882
------	-------	-------	-------

Sumber: *The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) (2021)*

Sebagian besar lokasi yang mengalami serangan menggunakan senjata kimia berada di wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi. Pihak FFM mengalami kesulitan saat akan mengunjungi dan melakukan investigasi. Hal ini dikarenakan sangat penting untuk memastikan keselamatan tim FFM di kawasan yang penuh dengan kelompok bersenjata atau teroris. Tim FFM hanya dapat melakukan wawancara jarak jauh dan meninjau menggunakan satelit serta memanfaatkan media sosial untuk menganalisis sampel, foto dan video pecahan amunisi yang disediakan oleh masyarakat setempat.

Pada tahun 2015 FFM OPCW telah mengkonfirmasi penggunaan bom barel klorin dalam serangan di beberapa kota seperti Hama dan provinsi Idlib. Selain itu muncul juga laporan adanya penggunaan mustard belerang di provinsi Aleppo oleh ISIS. Selama melakukan investigasi baik UNSGM dan OPCW keduanya tidak memiliki wewenang untuk melakukan atribusi atau memutuskan siapa pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia tersebut (Koblentz 2019).

Gambar 4. peta serangan senjata kimia di Suriah



Sumber: OHCHR

Pada tahun 2019 OPCW membentuk unit baru yang bernama IIT (*Investigation and Identification Team*). IIT beranggotakan delapan orang dan dipimpin oleh duta besar Santiago Oñate Laborde, yang merupakan seorang pengacara dan diplomat yang sebelumnya menjabat sebagai perwakilan Meksiko OPCW dan sebagai penasihat hukum OPCW. OPCW telah menyetujui keputusan C-SS-4/DEC-3 yang merupakan keputusan untuk mengatasi ancaman penggunaan senjata kimia. Keputusan tersebut menetapkan persyaratan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan kimia di Suriah dan memperkuat kewenangan OPCW untuk melakukan atribusi. IIT merupakan unit yang bertugas untuk mengimplementasikan C-SS-

4/DEC-3. IIT telah mengidentifikasi sembilan insiden penggunaan senjata kimia di Suriah yang akan diselidiki untuk menentukan pihak yang terlibat.

Table 2. daftar insiden yang diselidiki oleh IIT

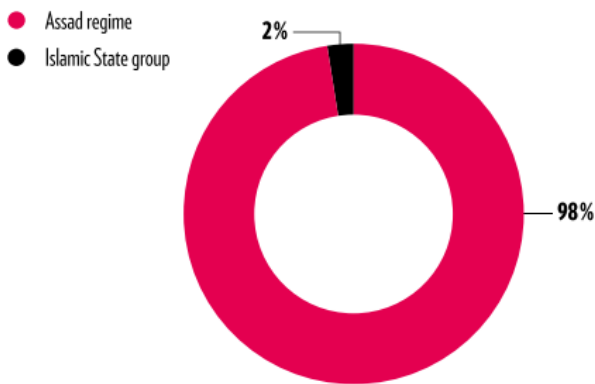
Tanggal	Lokasi	jenis dan metode senjata kimia	korban
April 12, 2014	Al-Tamanah, ke gubernuran Idlib	Bom barel klorin dijatuhkan dari helikopter	25 luka-luka
April 18, 2014	Al-Tamanah, ke gubernuran Idlib	Bom barel klorin dijatuhkan dari helikopter	66 luka-luka dan 4 meninggal.
April 18, 2014	Kafr Zita, ke gubernuran Hama	Bom barel klorin dijatuhkan dari helikopter	35 luka-luka
September 1, 2015	Marea, ke gubernuran Aleppo	Sulfur mustard dalam proyektil artileri	52 luka-luka
Maret 24, 2017	Ltamenah, ke gubernuran Hama	Bom sarin yang dijatuhkan oleh pesawat sayap tetap	16 luka-luka
Maret 25, 2017	Ltamenah, ke gubernuran Hama	Silinder klorin yang dijatuhkan oleh helikopter	30 luka-luka dan 3 meninggal
Maret 30, 2017	Ltamenah, ke gubernuran Hama	Bom sarin yang dijatuhkan oleh pesawat tetap	155 luka-luka
Februari 4, 2018	Saraqib, ke gubernuran Idlib	Silinder klorin yang dijatuhkan oleh helikopter	11 luka-luka
April 7, 2018	Douma, Damascus	2 silinder klorin yang dijatuhkan oleh helikopter	70 luka-luka dan 43 meninggal

Source: OPCW

Insiden diatas dipilih dari 39 insiden yang telah dikumpulkan oleh FFM. 9 insiden tersebut hanyalah sebagian kecil dari laporan serangan kimia di Suriah pada rentan waktu tahun 2015-2018. FFM mencatat adanya 143 tuduhan penggunaan senjata kimia di Suriah, *Global Public Policy Initiative* (GPPI) mengidentifikasi 336 serangan kimia di Suriah pada tahun 2012-2018. Hampir 90% dari serangan ini menggunakan sarin. GPPI juga melaporkan bahwa pemerintah Suriah bertanggung jawab atas 98 persen atas serangan senjata kimia di Suriah. menurut Syrian Network for Human Rights (SNHR) serangan senjata kimia telah menewaskan sekitar 1.461 orang dan melukai 9.757 lainnya (Koblentz 2019).

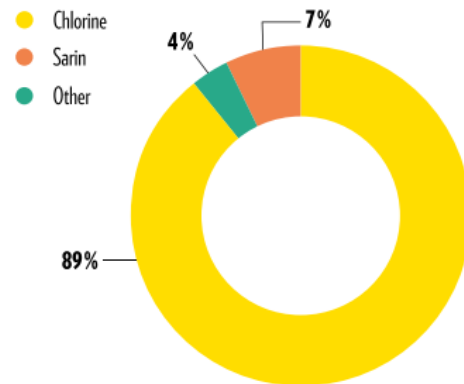
Gambar 5. Senjata kimia oleh pemerintah Suriah

Figure 4: Share of Confirmed Incidents by Perpetrator



Source: Data collected by GPPI

Figure 5: Shares of Identified Chemical Agents



Sumber: GPPI

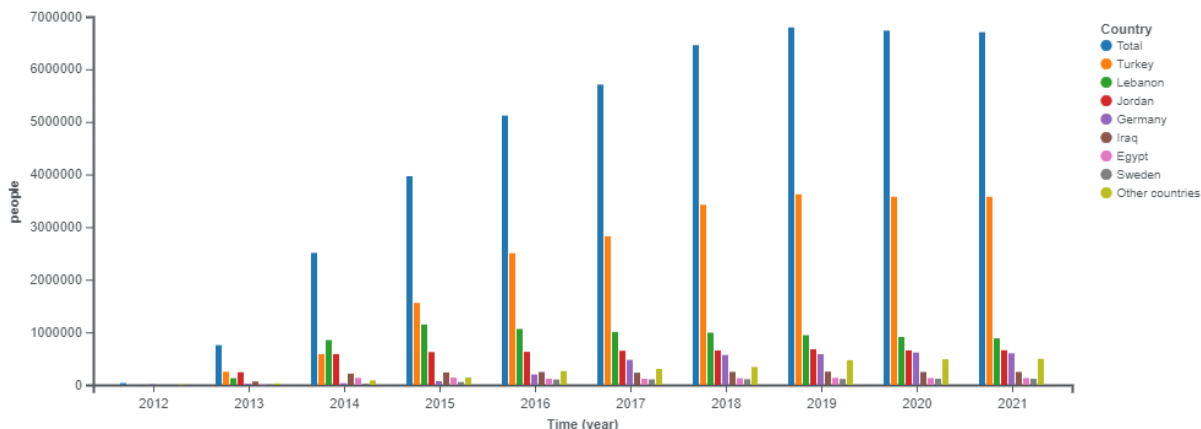
Selama Konflik terjadi pemerintah Suriah telah menyumbang serangan klorin sebanyak 91,5% dari semua senjata yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah juga bertanggung jawab atas 98% serangan senjata kimia di Suriah. Dalam sudut pandang pemerintah

Suriah Klorin merupakan senjata yang memberikan keunggulan. Klorin merupakan senjata yang murah dan mudah didapatkan, selain itu insrastruktur industri Suriah memudahkan proses penyimpanan senjata klorin. Senjata kimia klorin jauh lebih mematikan dibandingkan dengan senjata kimia yang lain yang digunakan oleh pemerintah Suriah (TOBIAS SCHNEIDER 2019)

2.3 Krisis Pengungsi Suriah

Isu pengungsi Suriah masih menjadi krisis pengungsi terbesar di dunia hingga saat ini. Sejak perang saudara secara resmi di mulai pada tahun 2011 sekitar 6,8 juta warga Suriah memilih untuk menjadi pengungsi dan pencari suaka dan 6,7 juta orang terlantar di Suriah. Berlanjutnya konflik Suriah membuat pusat perawan kesehatan dan rumah sakit, sekolah hingga sistem sanitasi hancur sehingga memperparah keadaan warga Suriah (Reid 2021). UNHCR melaporkan lebih dari 13,4 juta orang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk 6 juta yang sangat membutuhkan. 80% pengungsi Suriah hidup dibawah garis kemiskinan, dengan akses terbatas ke layanan dasar, pendidikan atau kesempatan kerja. Sekitar 2,5 juta anak-anak pengungsi Suriah kehilangan dan putus sekolah dan 1,6 juta lainnya beresiko putus sekolah. Pengungsi Suriah juga telah mencari suaka di lebih dari 130 negara, tetapi sebagian besar pengungsi Suriah menetap di beberapa negara tetangga seperti Turki Lebanon, Yordania, Irak dan Mesir (UNHCR 2022).

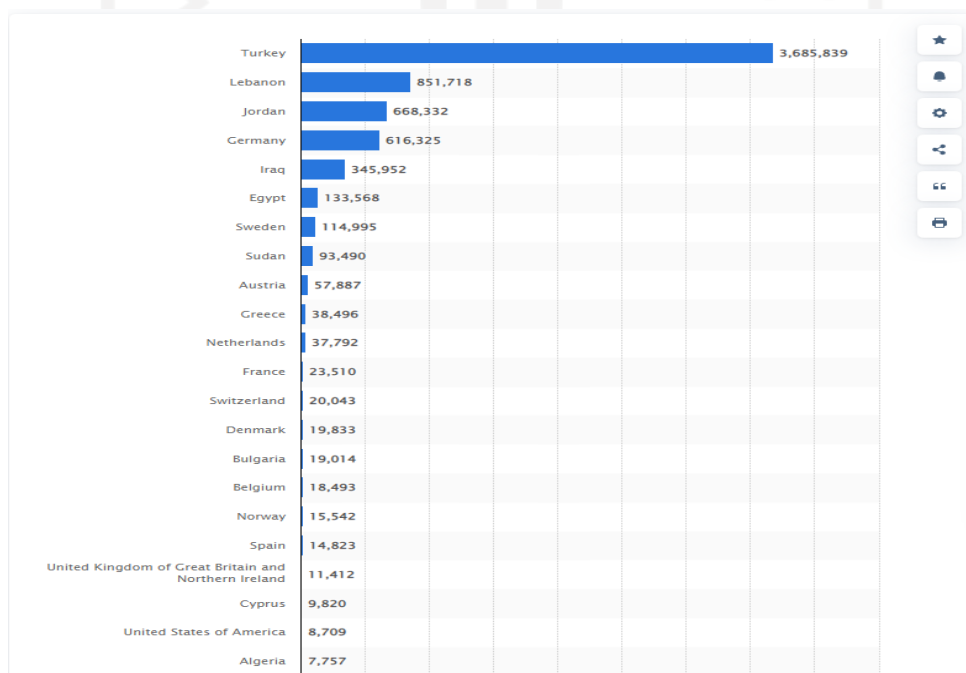
Gambar 6. pengungsi Suriah



Sumber: UNHCR (2021)

Konflik Suriah menyebabkan setengah dari populasi warga negara terlantar secara paksa. Sejak perang saudara dimulai terdapat hampir 1,7 juta orang yang melarikan ke negara tetangga seperti Yordania dan Lebanon.

Gambar 7. Peringkat negara-negara penerima pengungsi Suriah terbesar pada tahun 2020



Sumber: statista.com

Pada tahun 2020 Turki menjadi negara penerima pengungsi Suriah terbanyak dengan jumlah pengungsi yaitu 3,68 juta jiwa. Lebanon berada di urutan kedua dan menampung sebanyak 851 ribu pengungsi suriah. Sedangkan Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang menerima pengungsi Suriah terbanyak dengan jumlah 616,325 jiwa.

2.3.1 Turki

Sejak tahun 2011 konflik Suriah telah menelan banyak korban, ribuan pengungsi dan ribuan anak-anak kehilangan keluarga mereka. Tidak hanya korban jiwa konflik ini juga menghancurkan ribuan infrastruktur sehingga membuat banyak warga Suriah kehilangan tempat tinggal. Akibatnya hampir separuh populasi warga Suriah mengungsi ke berbagai negara (Rijnoveanu and Demir 2013). Turki memiliki kebijakan pintu terbuka atau *Open Door Policy* yang mengacu pada *Geneva Convention 1951*. Sebelum kebijakan ini ada pemerintah Turki tidak menerima adanya arus pengungsi yang masuk secara besar. Kebijakan Turki untuk membuka pintu bagi pengungsi Suriah membuat Turki menjadi negara penampung pengungsi terbanyak di dunia. Kebijakan Turki dalam membuka pintu bagi pengungsi Suriah ternyata tidak dimiliki oleh negara-negara Arab lainnya, termasuk negara Uni Eropa (Rizqullah et al. 2020).

Orang asing yang ingin memasuki wilayah Turki melalui perbatasan harus memiliki paspor dan visa, dan pengungsi juga harus melakukan beberapa prosedur ketat untuk dapat memasuki perbatasan Turki (Amalia 2018). Pada tahun 2014 Turki menjadi negara penerima pengungsi nomor satu, berdasarkan data statistik UNHCR Turki menerima sekitar 1.580.000 orang pada pertengahan 2014, pada tahun 2015 Turki menampung sekitar 2.503.549 pengungsi Suriah dan pada tahun 2016 Turki menampung sebanyak 2.970.000 pengungsi (UNHCR 2022). Pada tahun 2019 pengungsi Suriah menembus angka hingga 3 juta orang, hal ini menjadikan warga Suriah

sebagai pengungsi terbanyak di Turki. Berdasarkan laporan UNHCR pada tahun 2018 Turki menampung lebih dari 60% dari semua Pengungsi Suriah yang terdaftar.

Gambar 8. total pengungsi Suriah di Timur Tengah

Total Persons of Concern by Country of Asylum JSON

Location name	Source	Data date	Population
Turkey	Government of Turkey	31 Mar 2022	65.7% 3,763,565
Lebanon	UNHCR	31 Mar 2022	14.7% 839,086
Jordan	UNHCR	31 Mar 2022	11.8% 674,268
Iraq	UNHCR	31 Mar 2022	4.5% 257,974
Egypt	UNHCR	31 Mar 2022	2.5% 140,789
Other (North Africa)	UNHCR	31 Dec 2021	0.8% 48,548

Sumber: UNHCR.org

Turki telah melakukan banyak upaya dalam menangani pengungsi Suriah, salah satu contoh upaya Turki yaitu dengan melibatkan organisasi internasional dan kelompok masyarakat sipil. Pada tahun 2015 UNHCR bekerja sama dengan pemerintah Turki untuk mengembangkan sistem suaka yang lebih efisien. Berbagai komunitas dan LSM juga memberikan bantuan kepada pengungsi Suriah dengan mendirikan layanan penerjemah, menawarkan konsultasi hukum dan lainnya. Pemerintah Turki juga membuat 25 kamp di 10 provinsi Turki sebagai tempat tinggal para pengungsi. Kamp-kamp ini dikelola sesuai dengan pedoman yang dibentuk oleh UNHCR (Rizqullah et al. 2020).

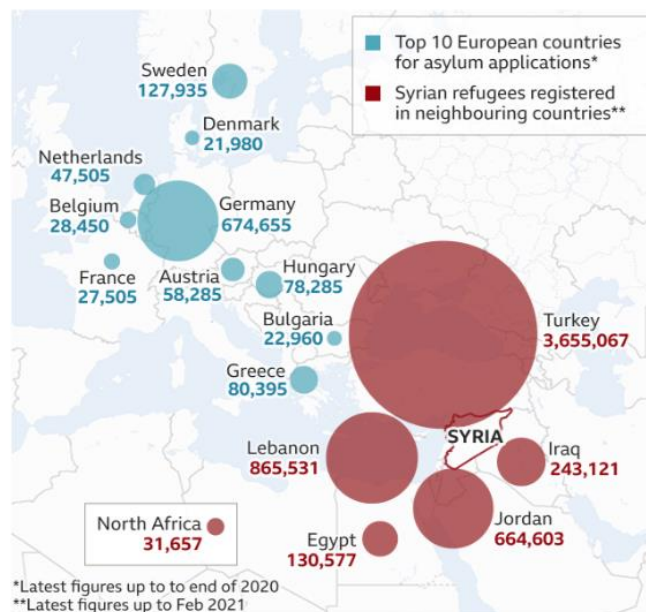
Turki menghadapi banyak tantangan karena kebijakannya dalam menerima pengungsi Suriah. Dalam mengatasi masalah pengungsi pemerintah Turki membutuhkan biaya yang cukup besar untuk memberikan fasilitas bagi para pengungsi Suriah. Selain masalah biaya pemerintah Turki juga menghadapi tantangan lainnya seperti adanya perbedaan budaya sehingga sering menciptakan ketegangan dan konflik (Kirişci 2014). Pemerintah Turki juga menghadapi banyak protes dan keluhan yang berasal dari masyarakat Turki. Pengungsi Suriah menjadi tantangan

tersendiri bagi penduduk asli Turki, terutama bagi masyarakat yang tinggal di ibu kota. Persaingan dalam hal ekonomi dan pekerjaan serta budaya menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat Turki. Masalah tersebut membuat adanya konflik baru di Turki yang membuat masyarakat Turki meminta pemerintah Turki untuk membawa pengungsi Suriah kembali ke negaranya (Rizqullah et al. 2020).

2.3.2 Krisis Pengungsi Suriah di Eropa

Negara-negara eropa menampung lebih dari 1 juta pencari suaka dan pengungsi Suriah, dengan 70 persen hanya ditamung di dua negara: Jerman (59 persen) dan swedia (11 persen). Eropa secara konsisten memberikan status perlindungan internasional kepada pengungsi (UNHCR 2021b).

Gambar 9. Jumlah Pengungsi di Eropa



Source: Eurostat / UNHCR, via [BBC](#).

Sumber: UNHCR

Lebih dari satu juta migran dan pengungsi menyebrang ke Eropa pada tahun 2015. Sebagian besar pengungsi memasuki Eropa menggunakan jalur laut tetapi beberapa migran telah melewati daratan terutama melalui Turki dan Albania. Konflik Suriah masih menjadi pendorong terbesar terjadinya migrasi ke Eropa. Tetapi adanya kekerasan yang terjadi di Afghanistan dan Irak serta kemiskinan di Kosovo, juga menjadi alasan adanya kegiatan migrasi ke Eropa (BBC 2016a). Di Eropa, Jerman merupakan salah satu negara yang menampung migran internasional paling banyak. Antara tahun 2015 hingga 2019 Jerman menampung sebanyak 1.622.954 pengungsi Suriah. Di Jerman pengungsi Suriah didistribusikan secara berbeda di negara bagian Jerman. Sebagian besar pengungsi terdaftar di North Rhine-Westphalia sebanyak 24,3%, diikuti oleh Bavaria sebanyak 13,1% dan Lower Saxony sebanyak 9,60% (Al Masri et al. 2021).

Banyak lembaga Eropa dan negara Anggota Eropa dan organisasi nasional telah memberikan dukungan dan bantuan bagi para pengungsi Suriah. Portugal, Kroasia dan Estonia memberikan bantuan dana dalam kursus bahasa Inggris. Belanda, Swedia, Jerman dan beberapa negara lain juga membantu pengungsi dalam mengatasi permasalahan perbedaan bahasa. Selain itu negara-negara Eropa juga memberikan akses pasar tenaga kerja untuk memperkuat ekonomi negara tuan rumah. Tetapi bantuan-bantuan yang diberikan oleh berbagai lembaga di Eropa mengalami hambatan seperti, keterbatasan dana dan hilangnya koordinasi antar lembaga. Selain mahal biaya dalam kursus bahasa Inggris, bantuan dalam akses kesehatan juga mengalami kesulitan akibat sistem birokratis yang rumit (European Commission, 2021).

BAB III

KEPENTINGAN NASIONAL SURIAH DALAM KONFLIK SURIAH

3.1 Kepentingan Nasional (National Interest)

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori kepentingan nasional yang dikembangkan oleh Scott Burchill. Konsep ini menjadi kunci dalam pendekatan realisme yang sangat percaya bahwa negara merupakan satu-satunya aktor atau entitas dalam Hubungan Internasional. Dalam bukunya yang berjudul *The National Interest in International Relations Theory*, Scott Burchill melakukan analisis mengenai konsep kepentingan nasional dalam realisme. Realisme merupakan teori yang memiliki pendapat bahwa pada dasarnya negara dan manusia memiliki sifat agresif dan egosentrik dalam memperoleh kekuasaan. Dalam situasi anarkis negara mengambil langkah militer untuk memperjuangkan kekuasaannya. Realisme memberikan konsep seperti kepentingan nasional, kedaulatan negara, kekuatan nasional dan integritas nasional dalam mempertahankan kekuasaan (Burchill 2005).

Realisme mencoba untuk melihat dan menjelaskan politik internasional yang “apa adanya”. Tujuan utama realisme yaitu keberlangsungan hidup negara yang mana hal ini menjadi alasan tindakan negara selalu didasarkan kepada kepentingannya. Teori realisme memiliki empat prinsip utama: (a) sifat dasar manusia yang dipandang secara pesimis, (b) hubungan internasional pada dasarnya menyelesaikan konflik dengan cara berperang, (c) kelangsungan hidup negara dan keamanan nasional merupakan tujuan utama (*national security and state survival*), (d) politik internasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan politik domestik.

Menurut pandangan realis Keputusan suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan keamanannya sendiri biasanya dengan melemahkan keamanan pihak lain. Peningkatan keamanan

merupakan langkah untuk bertahan hidup yang mana menjadi tujuan utama negara. ketika keamanan suatu negara telah tercapai maka tujuan lain seperti keuntungan, kekuasaan dan ketentraman menjadi penting. Kebijakan luar negeri negara biasanya dipengaruhi oleh kebijakan domestik dan program domestik sering menjadi bagian penting dari proses keputusan. Realisme politik dalam menganalisis hubungan internasional akan selalu berdasar kepada realitas (Morgenthau 2010).

Pandangan ini melihat bahwa kepentingan nasional merupakan kepentingan negara. Negara merupakan entitas politik tertinggi di masyarakat dan anarkisme dalam politik internasional hanya bisa ditanggulangi oleh negara. Oleh karena itu negara merupakan satu-satunya aktor dalam politik internasional. Kepentingan nasional merupakan kepentingan negara yang dilandaskan oleh kekuasaan yang mereka miliki. Menurut Burchill perilaku negara dalam Hubungan Internasional adalah untuk menjaga agar elemen-elemen “power” yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya didalam masyarakat internasional.

Dalam konsep ini politik luar negeri harus bisa membangkitkan “ketakutan” dari negara lain sehingga mereka tidak berani melakukan serangan atau memberikan ancaman terhadap negara lain. Dalam perspektif ini struktur internasional yang anarkis menjadi kata kunci untuk menjelaskan peran negara (Burchill 2005). Konsep kepentingan nasional diposisikan untuk melihat tujuan Suriah dalam konflik Suriah. kepentingan nasional sangat erat hubungannya dengan power suatu negara sebagai tujuan maupun instrumen. Keputusan luar negeri suatu negara hanya akan mengakui negara sebagai satu-satunya entitas tertinggi. Oleh karena itu negara merupakan satu-satunya aktor dalam konsep ini (Burchill 2005).

3.1.1 Kepentingan Nasional Suriah

Pemerintah Suriah juga memiliki kepentingan nasional utama yaitu stabilitas dan kemerdekaan. Pemimpin Suriah Bashaar al-Assad menyatakan bahwa konflik Suriah membawa sisi positif yaitu tatanan sosial di Suriah menjadi lebih homogen. Masyarakat yang merupakan pendukung dan tergabung dalam Free Syrian Army atau kelompok oposisi lainnya telah ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Suriah, terutama yang tinggal di daerah yang saat ini dikuasai oleh rezim Suriah (Dacrema, 2019).

Selama konflik Suriah terjadi pemerintah Suriah telah melakukan banyak pelanggaran hukum humaniter internasional. Pemerintah Suriah dapat dikatakan cukup sering melakukan kekerasan untuk menekan pihak oposisi maupun masyarakat sipil. Kantor Komisaris Tinggi melaporkan bahwa sekitar 350.000 warga sipil telah tewas antara Maret 2011 dan Maret 2021 (aljazeera 2021). Jumlah ini merupakan jumlah minimum yang dapat diverifikasi, hal ini dikarenakan keterbatasan dalam melakukan identifikasi terhadap korban. Jumlah pembunuhan terbesar yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terjadi di kota Aleppo yang telah lama dipegang oleh *Free Syrian Army* (FSA) sebagai kelompok oposisi. Dalam konflik yang terjadi antara pasukan pemerintah Suriah dan juga FSA di Aleppo ini setidaknya memakan 51.000 korban jiwa. Selain itu 34.000 warga sipil termasuk juga FSA dipindahkan dari Aleppo oleh pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah menyatakan kepentingannya di kota Aleppo yaitu untuk mengembalikan keamanan dan kekuasaannya di kota Aleppo. Konflik yang terjadi di kota Aleppo merupakan salah satu kemenangan terbesar bagi presiden Bashar al-Assad sejak tahun 2011 (BBC, 2016).

Selain konflik yang memakan banyak korban pemerintah Suriah juga melakukan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Suriah melakukan praktik penahanan dan penghilangan secara paksa. Pemerintah Suriah bertanggung jawab atas 87% kasus penangkapan

dan penahanan secara paksa. UNHCR melaporkan sedikitnya 149,457 orang ditangkap dan ditahan secara paksa oleh pemerintah Suriah dalam rentan waktu tahun 2011-2021. UNHCR juga melaporkan bahwa setidaknya terdapat 14,537 korban penyiksaan oleh pemerintah Suriah sejak tahun 2011. Penahanan paksa dan penyiksaan ini dilakukan pemerintah Suriah kepada kritikus pemerintah, kelompok oposisi termasuk FSA, dan jurnalis (UNHCR, 2021).

Empat badan intelijen Suriah merupakan pelaku utama dalam praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia di Suriah. Badan Intelijen Angkatan Udara (*Al-Mukhabarat al-Jawiya*), Badan Intelijen Militer (*Al-Mukhabarat al-Askariya*), Badan Intelijen Politik (*Al-Amn al-Siyasi*), Badan Intelijen Umum (*Al-amm al-Amm*), memiliki tugas untuk menyiksa dan melakukan penahanan. sedangkan Badan Intelijen Nasional (*Al-Amn al-Wattani*) bertugas untuk mengawasi badan-badan tersebut. lembaga-lembaga ini dilengkapi dengan personil yang berkualitas dan memiliki penjara yang terletak di seluruh negeri. Fasilitas penahanan ini didirikan sebagai penjara interogasi, dimana para tahanan akan disiksa selama proses interogasi. Pemerintah Suriah menyatakan bahwa interogasi merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan. Tapi pada kenyataannya proses interogasi bukan sebagai upaya untuk mendapatkan informasi tetapi sebagai sarana untuk menerror dan menyiksa warga sipil maupun kelompok oposisi (ECCHR 2021).

Pemerintah Suriah juga melakukan pemindahan secara paksa terhadap masyarakat sipil dan juga kelompok oposisi. Sejak konflik Suriah dimulai, jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka karena kekerasan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus meningkat. Jumlah orang yang dipindahkan secara paksa mencapai 8,93 juta orang dan 83% pengungsi terpaksa membebani sumber daya tuan rumah. Kelangsungan hidup pengungsi Suriah bergantung pada ketersediaan bantuan yang diberikan oleh masyarakat dan organisasi internasional (European Commission, 2021). Pada awal tahun 2012 pemerintah Suriah telah membentuk rencana

rekonstruksi untuk memperbaiki kota-kota Suriah yang hancur. Rencana rekonstruksi ini mencakup sejumlah undang-undang yang dirancang untuk membangun kembali wilayah yang telah hancur. Pemerintah Suriah juga melenyapkan pemukiman yang dibangun secara tidak sah di seluruh Suriah. Pada dasarnya pemerintah Suriah menggunakan undang-undang tersebut untuk mengambil alih kepemilikan pribadi dan mengusir penduduk di daerah yang dikuasai oleh kelompok oposisi (Heydemann 2018).

Pemerintah Suriah memiliki kepentingan tersendiri dalam melakukan rangkaian pelanggaran tersebut. Pemerintah Suriah memiliki kepentingan untuk membangun masyarakat Suriah yang hegemoni. Undang-undang rekonstruksi yang dibuat oleh Suriah merupakan alat yang dapat memberikan kebebasan bagi pemerintah dalam menguasai suatu wilayah. Undang-undang ini memberikan landasan legislatif bagi pemerintah Suriah dan memberikan wewenang untuk secara bebas menyita properti dan juga mengusir warga sipil maupun kelompok oposisi. Undang-undang rekonstruksi memberikan otoritas pengambilan keputusan secara penuh kepada pemerintah Suriah. Skema rekonstruksi merupakan bagian dari strategi pemerintah Suriah dalam konflik Suriah untuk mengusir pihak-pihak yang tidak diinginkan (Heydemann 2018). Kepentingan Suriah dalam menciptakan masyarakat yang hegemoni dinyatakan oleh presiden Bashar al-Assad pada pidato pembukaan konferensi di kementerian Luar Negeri Suriah tahun 2017. Assad mengatakan bahwa dengan kehilangan warga Suriah yang bukan pendukung nya, maka Suriah akan memiliki tatanan sosial yang lebih sehat dan lebih homogen. Homogenitas yang dimaksud oleh Assad yaitu mengacu pada kesetiaan kepada rezim dan negara Suriah, bukan dalam istilah agama ataupun etnis (Gerlach 2019).

Pemerintah Suriah juga melakukan pelanggaran berat dengan menggunakan senjata kimia dalam konflik Suriah. Laporan mengenai penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh

pemerintah Suriah mulai muncul pada tahun 2012. Dugaan pertama penggunaan senjata kimia dilaporkan. Senjata kimia memiliki efek samping seperti mual, penglihatan kabur, dan kesulitan bernapas. Pemerintah Suriah secara konsisten melakukan serangan senjata kimia sejak awal konflik Suriah terjadi. *Global Public Policy* melaporkan setidaknya terdapat 336 serangan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah pada rentan waktu 2012-2018. Pemerintah Suriah bertanggung jawab atas 89% serangan senjata kimia yang terjadi di Suriah. Pemerintah Suriah menargetkan serangan senjata kimia ke wilayah-wilayah yang di kuasai oleh kelompok oposisi (Pita and Domingo 2014).

kepentingan Suriah menggunakan senjata kimia dalam konflik Suriah yaitu ingin menguasai kembali dan mengusir kelompok oposisi dari wilayah Suriah. menurut realisme klasik negara memiliki sifat egosentrik dan akan melakukan apa saja untuk mencapai kepentingannya. Dalam mencapai kepentingannya yaitu untuk memenangkan konflik dan mengembalikan otoritasnya pemerintah Suriah mengabaikan Hukum Humaniter dan juga Hak Asasi Manusia. Penggunaan senjata kimia oleh pemerintah Suriah juga bertujuan untuk menjangkau tempat persembunyian yang dibuat oleh kelompok oposisi. Senjata kimia dapat memberikan keuntungan seperti menghasilkan korban yang besar dengan sedikit usaha (TOBIAS SCHNEIDER 2019). Suriah telah bergabung dengan CWC pada tahun 2013 investigasi penggunaan senjata kimia berada di bawah yurisdiksi *Organization of Prohibited Chemical Weapon OPCW*. Penggunaan senjata kimia secara tegas telah dilarang oleh *The Chemical Weapon Convention 1993*. Sebagai anggota PBB dan anggota protokol jenewa 1925 Suriah telah mengabaikan tugas dan kewajibannya dengan menggunakan senjata kimia dalam melawan pihak oposisi (Ananda and Kusniati 2022).

Pada tahun 2009 presiden Suriah Bashar al-Assad menyatakan bahwa Suriah telah mengembangkan senjata kimia (Spiegel 2009). Laporan penggunaan senjata kimia mulai

meningkat pada tahun 2012 dimana senjata kimia digunakan dalam perang saudara oleh pemerintah dan juga pihak oposisi. Pada tanggal 23 Juli 2012 juru bicara Kementerian Luar Negeri Suriah mengkonfirmasi dalam konferensi pers bahwa Suriah memiliki senjata kimia tetapi tidak digunakan untuk melawan warga sipil melainkan digunakan untuk melawan agresor eksternal (Hart, Verbruggen, and Maletta 2017). Pada tahun 2013 Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menerima permintaan dari pemerintah Suriah untuk menyelidiki kasus dugaan penggunaan senjata kimia yang terjadi di Khan al-Assal pada 19 Maret. Pemerintah Suriah menyatakan bahwa pelaku dari serangan ini adalah teroris. Permintaan ini diterima dengan dasar protokol Jenewa tahun 1925 yang melarang penggunaan gas beracun atau metode perang lainnya yang menggunakan bahan berbahaya. Suriah telah menyetujui protokol tersebut pada tahun 1968. Pada tahun 2013 PBB mengumumkan bahwa penyelidikan mengenai penggunaan senjata kimia di Suriah akan dimulai. Pemerintah Suriah menyatakan bahwa penggunaan senjata kimia dilakukan oleh tim oposisi. Inggris dan Prancis menyatakan bahwa pemerintah Suriah juga menggunakan senjata kimia selama konflik terjadi (Pita and Domingo 2014).

3.2 Mempertahankan Sistem Politik

Pada tahun 2011 sejak konflik Suriah terpecah masyarakat internasional berpendapat bahwa rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad akan jatuh dan tidak dapat bertahan. Tetapi hingga saat ini rezim pemerintah Suriah masih menjadi pihak yang memiliki kekuatan dominan di Suriah. Rezim Assad mampu mengklaim bahwa Suriah dibawah pemerintahannya merupakan kunci dari kelangsungan hidup Suriah. Ketika konflik bersenjata dimulai rezim Suriah menjaga badan-badan milik negara agar terus tetap berjalan dan membuat rakyat bergantung pada kekuasaannya. Negara Suriah masih menjadi penyedia utama kebutuhan pokok rakyat Suriah. Rezim Assad dan negara Suriah merupakan dua entitas yang berbeda tetapi sangat berkaitan (Khaddour 2015).

Hafez al-Assad merupakan ayah dari Bashar al-Assad dan juga mantan presiden Suriah yang berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta militer pada tahun 1970. Selama tiga dekade berkuasa rezim Assad mulai membuat aparat negara dan lembaga-lembaga negara dengan simbol keluarga penguasa Assad (Selvik 2014). Layanan pemerintah menopang sebagian besar kehidupan masyarakat Suriah. Kantor administrasi negara merupakan satu-satunya lembaga yang dapat mengeluarkan dokumen resmi dan penting bagi warga Suriah. Pada awal 2011 sejak konflik terjadi rezim Assad berusaha untuk mempertahankan lembaga negara agar tetap berada dibawah kendalinya. Lembaga-lembaga negara dilindungi dengan baik oleh pasukan keamanan yang berafiliasi dengan rezim. Tidak hanya kantor administrasi tetapi lembaga utama seperti birokrasi pemerintah dan lembaga yang memberikan fasilitas dokumen pribadi warga Suriah juga berada dibawah kendali rezim Assad. Lembaga-lembaga negara ini merupakan kebutuhan utama warga Suriah dalam bertahan hidup di negara Suriah. (Khaddour 2015).

Strategi pemerintah Suriah dalam mengendalikan lembaga utama negara berhasil mengundang warga sipil untuk memasuki wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Alasan warga sipil untuk memasuki wilayah yang berada dibawah kendali pemerintah Suriah yaitu alasan keamanan dan mudahnya dalam mendapatkan akses ke lembaga-lembaga administrasi negara. kepentingan Suriah dalam mengambil alih lembaga-lembaga utama negara yaitu agar mendapatkan dukungan warga Suriah kembali (Khaddour 2015). Upaya Suriah dalam mempertahankan lembaga utama negara merupakan salah satu bentuk kepentingan nasionalnya dalam mempertahankan sistem politiknya. Sistem politik merupakan salah satu kepentingan nasional yang utama dalam realisme klasik menurut Morgenthau (Morgenthau 2010).

Pada tahun 2013, dua tahun setelah konflik Suriah dimulai pemerintah Suriah hanya menguasai seperlima wilayah Suriah. Pada tahun 2021 pemerintah Suriah berhasil menguasai

hampir dua pertiga wilayah Suriah termasuk kota-kota penting seperti Damaskus, Aleppo, Homs, Hama, Latakia, Tartus, Deraa, dan Deir al-Zour. Pemerintah Suriah memiliki beberapa strategi dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya yaitu; memulihkan kendali atas teritorialnya, menyingkirkan lawan sebanyak mungkin, dan menghilangkan kekuatan pihak oposisi (Zafer Kizilkaya, Sofie Hamdi 2021). Pemerintah Suriah melakukan serangkaian cara sebagai strategi untuk mencapai kepentingannya dalam mempertahankan kelangsungan negaranya. Senjata kimia merupakan salah satu cara pemerintah Suriah untuk mencapai kepentingan nasionalnya tersebut. kepentingan Suriah menggunakan senjata kimia dalam konflik Suriah yaitu ingin menguasai kembali dan mengusir kelompok oposisi dari wilayah Suriah (TOBIAS SCHNEIDER 2019).

3.3 Menguasai Wilayah Suriah

Dalam bukunya Morgenthau menyatakan bahwa perebutan kekuasaan merupakan upaya suatu negara untuk mendapatkan tujuan akhirnya yaitu kekuasaan. Akan tetapi dalam upayanya untuk mewujudkan tujuan ini dengan cara politik internasional, negara melakukan hal tersebut dengan bentuk kekerasan. Morgenthau juga menyatakan bahwa kekuasaan yang dimaksud merupakan pengendalian atas pikiran dan tindakan orang lain. Dengan adanya kekuatan politik maka negara akan memiliki hubungan yang timbal-balik dengan rakyat. Morgenthau juga menyatakan tiga cara negara untuk mempengaruhi rakyat dalam mendapatkan kekuasaan. Tiga cara tersebut yaitu; harapan rakyat terhadap negara, rasa takut rakyat akan keadaan yang merugikan, dan rasa hormat kepada individu atau lembaga (Morgenthau 2010).

Penggunaan kekerasan sebagai bentuk ancaman merupakan salah satu unsur yang melekat pada politik. Menurut Morgenthau penggunaan kekerasan sebagai ancaman merupakan cara yang efektif dalam membantu kekuatan politik suatu negara. Penggunaan kekerasan fisik akan menentukan pihak negara merupakan pihak yang lebih kuat sebagai pemegang kekuasaan

(Morgenthau 2010). Rezim Assad sebagai pemegang kekuasaan pemerintah Suriah selalu berupaya untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin Suriah. Sejak konflik dimulai pemerintah Suriah selalu menolak untuk mundur dan mengalah. Penggunaan kekerasan secara konsisten dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam menekan warga suriah maupun pihak oposisi sejak awal konflik. Rezim Assad cenderung menggunakan kekerasan dalam menekan pihak oposisi. Pihak pemerintah juga terbukti telah menggunakan senjata kimia dalam menekan pihak oposisi. Kepentingan Suriah dalam menggunakan senjata kimia salah satunya yaitu untuk menguasai kembali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh pihak oposisi (BBC 2016).

Menurut realisme power merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Faktanya tidak semua masyarakat Suriah masuk kedalam pihak oposisi. Dalam konflik Suriah, negara Suriah masih menjadi pihak terkuat baik dalam bidang politik, militer dan juga diplomasi (Mamdud 2017). Penggunaan senjata kimia dan kekerasan yang dilakukan pemerintah Suriah sebagai bentuk ancaman efektif membuat rakyat Suriah memilih untuk kembali memihak rezim Assad untuk alasan keamanan. Saat ini hampir seluruh wilayah Suriah telah dikuasai kembali oleh pemerintah Suriah. Pemerintah Suriah juga telah menguasai kembali kota-kota penting di Suriah (Zafer Kizilkaya, Sofie Hamdi 2021).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik bersenjata yang terjadi antara pemerintah Suriah dan kelompok oposisi di Suriah dimulai pada tahun 2011. Kerusuhan yang terjadi meningkat antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi bersenjata di provinsi daraa sejak bulan juli 2011. Kelompok oposisi dalam konflik Suriah salah satunya adalah FSA (*Free Syrian Army*). FSA merupakan kelompok bersenjata yang berasal dari kelompok militer Assad yang membelot dan juga terdiri dari beberapa masyarakat sipil. FSA memiliki kepentingan untuk menggulingkan rezim Assad. FSA merupakan kelompok bersenjata terbesar dalam kelompok oposisi. Sejak konflik bersenjata antara pemerintah dan kelompok oposisi di Suriah dimulai pada 2011 setidaknya 580.000 orang telah tewas. Komisi penyelidikan yang dimandatkan oleh dewan hak asasi manusia PBB di Suriah telah melaporkan setidaknya lebih dari 130.000 korban penahanan, penculikan dan penghilangan sejak 2011, dengan mayoritas disebabkan oleh pemerintah Suriah. lebih dari 13 juta orang telah mengungsi dan diperkirakan 13,4 juta warga Suriah masih membutuhkan bantuan.

Selama Konflik terjadi pemerintah Suriah telah menyumbang serangan klorin sebanyak 91,5% dari semua senjata yang dilakukan oleh pemerintah Suriah. pemerintah Suriah juga bertanggung jawab atas 98% serangan senjata kimia di Suriah. Pemerintah Suriah bertanggung jawab setidaknya 87% dari kasus penangkapan dan penahanan secara paksa. Pemerintah Suriah tidak melakukan identifikasi saat melakukan tindakan penangkapan dan penahanan paksa.

Pada bab II penulis menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berkonflik yaitu pemerintah Suriah dan kelompok oposisi *Free Syrian Army*. Pada bab II penulis juga menyajikan beberapa data mengenai krisis kemanusiaan di Suriah. krisis kemanusiaan Suriah merupakan salah satu

krisis terbesar dalam satu dekade terakhir. Dalam bab II penulis menjabarkan mengenai pelanggaran-pelanggaran Suriah dalam konflik Suriah. selama konflik terjadi pemerintah Suriah secara terang-terangan melakukan pelanggaran hukum humaniter dan pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Suriah melakukan penangkapan dan penahanan paksa kepada kelompok oposisi dan juga warga sipil yang memiliki hubungan dengan oposisi. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan pemerintah Suriah tidak melakukan identifikasi sehingga banyak warga yang tidak bersalah ikut ditangkap dan ditahan. Pemerintah Suriah juga melakukan penyiksaan di dalam penjara Suriah. Dalam bab II penulis juga menjabarkan mengenai penggunaan senjata kimia yang secara konsisten dilakukan oleh pemerintah Suriah sejak konflik dimulai.

Sementara itu pada bab III penulis menggunakan teori realisme klasik oleh Hans J. Morgenthau dalam menganalisis kepentingan Suriah. Morgenthau menjelaskan 6 prinsip mengenai realisme klasik dalam bukunya yang berjudul "*politics among nations*". Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 prinsip dari 6 prinsip tersebut. 3 prinsip realisme yang penulis gunakan yaitu; konsep interest, national survival dan struggle for power. 3 prinsip ini penulis gunakan untuk menganalisis tindakan dan kepentingan Suriah dalam konflik Suriah. 3 prinsip ini juga menjelaskan alasan Suriah dalam menggunakan kekerasan dan juga senjata kimia sebagai bentuk strategi konflik.

Dalam memahami pendekatan realisme klasik di konflik suriah maka penting untuk melihat bagaimana aktor berperilaku selama konflik. Realisme klasik memiliki tiga asumsi inti yaitu: negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Negara merupakan aktor kesatuan dan rasional yang memiliki sifat egois dan bergerak sesuai dengan kepentingan nasionalnya, dan sistem internasional merupakan sistem yang anarki. Salah satu konsep realisme

yang dijelaskan oleh Morgenthau adalah konsep *Power* sebagai kepentingan. Dalam konflik Suriah rezim Bashar al-Assad masih menjadi aktor utama karena rezim Assad masih memegang kendali atas Suriah. Rezim Assad masih memiliki pengaruh yang cukup kuat di Suriah. Menurut realisme power merupakan kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Faktanya tidak semua masyarakat Suriah masuk kedalam pihak oposisi.

Prinsip kepentingan nasional (*national interest*) menjelaskan bagaimana Suriah berupaya dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Kunci utama dan inti dari realisme menurut Morgenthau berada dalam prinsip ini. Prinsip ini menyatakan bahwa politik internasional pada hakikatnya selalu memperjuangkan kepentingan. Prinsip ini berpandangan bahwa negara bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan nasionalnya. Konsep kepentingan (*Interest*) realisme mencoba melihat fakta mengenai sifat negara yang dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan kepentingannya.

Suriah melakukan serangkaian pelanggaran hukum internasional dalam rangka mewujudkan kepentingannya. Kepentingan nasional Suriah dalam konflik Suriah yaitu mewujudkan masyarakat yang hegemoni. Pemerintah Suriah juga memiliki kepentingan untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi. Kepentingan Suriah menggunakan senjata kimia dalam konflik Suriah yaitu ingin menguasai kembali dan mengusir kelompok oposisi dari wilayah Suriah. Menurut realisme klasik negara memiliki sifat egosentrik dan akan melakukan apa saja untuk mencapai kepentingannya.

Prinsip selanjutnya yaitu prinsip national survival atau kelangsungan hidup negara. Morgenthau menyatakan bahwa National Survival lebih penting daripada moralitas. Negara pada akhirnya akan mengandalkan kemampuan atau kekuatan mereka sendiri untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Realisme klasik memberikan gagasan bahwa negara harus berjuang

sendiri dan tidak dapat mengandalkan pihak lain dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Kelangsungan hidup negara merupakan salah satu kepentingan nasional suatu negara yang paling penting.

Selain kelangsungan hidup atau (*National Survival*) suatu negara, sistem politik dan integritas wilayah juga menjadi kepentingan nasional utama. Pada awal 2011 sejak konflik terjadi rezim Assad berusaha untuk mempertahankan lembaga negara agar tetap berada dibawah kendalinya. Strategi pemerintah Suriah dalam mengendalikan lembaga utama negara berhasil mengundang warga sipil untuk memasuki wilayah yang dikuasai oleh pemerintah. Upaya Suriah dalam mempertahankan lembaga utama negara merupakan salah satu bentuk kepentingan nasionalnya dalam mempertahankan sistem politiknya. Sistem politik merupakan salah satu kepentingan nasional yang utama dalam realisme klasik menurut Morgenthau. Pemerintah Suriah memiliki beberapa strategi daalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya yaitu; memulihkan kendali atas teritorialnya, menyingkirkan lawan sebanyak mungkin, dan menghilangkan kekuatan pihak oposisi.

Prinsip yang terakhir yaitu konsep Konsep '*struggle for power*' merupakan salah satu ciri khas dari perspektif realisme. Realisme berusaha untuk memahami perebutan kekuasaan antar negara dimana setiap negara berusaha mempertahankan atau meningkatkan kekuasaannya. Morgenthau menyatakan bahwa dalam politik internasional *power* atau kekuasaan merupakan suatu hal yang dominan. Morgenthau mendefinisikan kepentingan suatu negara sebagai *power* (kekuasaann). Menurut Morgenthau penggunaan kekerasan sebagai ancaman merupakan cara yang efektif dalam membantu kekuatan politik suatu negara. Penggunaan kekerasan fisik akan menentukan pihak negara merupakan pihak yang lebih kuat sebagai pemegang kekuasaan. Rezim Assad cenderung menggunakan kekerasan dalam menekan pihak oposisi. Pihak pemerintah juga

terbukti telah menggunakan senjata kimia dalam menekan pihak oposisi. Kepentingan Suriah dalam menggunakan senjata kimia salah satunya yaitu untuk menguasai kembali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh pihak oposisi.

4.2 Rekomendasi

Dalam menganalisis kepentingan Suriah dalam konflik Suriah tentunya bukanlah hal yang mudah. Mengingat konflik Suriah merupakan salah satu konflik yang cukup kompleks karena tidak hanya dua pihak yang terlibat. Hingga saat ini krisis Suriah terus berlanjut dan penderitaan masyarakat Suriah belum sepenuhnya usai. Penelitian ini hanya sebatas analisa bagaimana pemerintah Suriah memperjuangkan kepentingan nasional nya dalam melawan FSA. Oleh karena itu penulis memberikan beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya. Adapun rekomendasi dari penulis yaitu;

1. Dalam penelitian ini penulis mengalami beberapa kesulitan dalam mengolah data yang ada. Melihat konflik Suriah yang memiliki dampak yang luas tidak hanya di Suriah saja tetapi juga hingga negara-negara lain. Dalam konflik Suriah pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah Suriah dan pihak oposisi tetapi juga terdapat negara-negara lain yang ikut berperan. Maka dari itu penelitian selanjutnya akan lebih baik apabila membahas mengenai kompleksitas konflik dan penyebab konflik tidak juga selesai hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sohail, Muhammad Mubeen, and Inayat Kalim. 2020. "An Analysis of Syrian Conflict with the Lens of the Realist School of Thought." *Global Social Sciences Review* V (I): 660–71. [https://doi.org/10.31703/gssr.2020\(v-i\).66](https://doi.org/10.31703/gssr.2020(v-i).66).
- aljazeera. 2021. "New UN Death Toll: At Least 350,000 People Killed in Syria's War." *Aljazeera.Com*, September 24, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/9/24/at-least-350000-people-killed-in-syria-war-new-un-count>.
- Amalia. 2018. "Kebijakan Pintu Terbuka Turki Sebagai Upaya Deeskalasi Konflik Suriah." *Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 2 Juli – Desember 2018 Kebijakan* 5 (2): 190–208.
- Ananda, Ar Raffi Ridho, and Retno Kusniati. 2022. "Urgensi Larangan Penggunaan Senjata Kimia Di Suriah Menurut The Chemical Weapon Convention 1993." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 3 (1): 83–114. <https://doi.org/10.22437/up.v3i1.15449>.
- Arms Control Association. 2021. "Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2022." <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity>.
- Badescu, Cristina G. 2011. "Gareth Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All." *Human Rights Review* 12 (1): 133–35. <https://doi.org/10.1007/s12142-010-0168-5>.
- BBC. n.d. "Challenges Faced by Refugees." *Bbc.Co.Uk*. <https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z3p4b82/revision/1>.
- . 2014. "Krisis Kemanusiaan Suriah 'Terburuk,'" January 22, 2014. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/01/140122_suriah_krisis_kemanusiaan.
- . 2016a. "Migrant Crisis: Migration to Europe Explained in Seven Charts." *BBC NEWS*,

- March 4, 2016. <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>.
- . 2016b. “Syria: The Story of the Conflict.” *Bbc.Com*, March 11, 2016. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>.
- . 2016c. “Aleppo Battle: Syrian City ‘Back under Government Control.’” *BBC NEWS*, December 22, 2016. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-38408548>.
- Becker-Jakob, Una. 2019. “Countering the Use of Chemical Weapons in Syria: Options for Supporting International Norms and Institutions.” *Non-Proliferation and Disarmament Papers*, no. 63: 1–16.
- Benammar, Suheil Damouny and Emily. 2013. “Syria Opposition Parties: Explained.” *Abc.Net.Au*, August 29, 2013. <https://www.abc.net.au/news/2013-08-29/syria-opposition-parties/4913162>.
- Burchill, Scott. 2005. “The National Interest in International Relations Theory.” *The National Interest in International Relations Theory*, 1–224. <https://doi.org/10.1057/9780230005778>.
- Clementh, Samuel. n.d. “ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SURIAH TERHADAP PENGGUNAAN GAS SARIN DALAM PENYERANGAN KOTA KHAN SHAYKHUN DI SURIAH BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL,” 1–14.
- Dr. Vladimir, Vega Falcon. 1967. *International Relations The Basic. Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. Vol. 1.
- ECCHR. 2021. “End Human Rights Violations in Syria.”
- Elgot, Jessica. 2018. “Britain to Axe Funding for Scheme Supporting Syrian Opposition.” *Theguardian.Com*, 2018. <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/20/britain-to-stop-funding-free-syria-opposition-as-assad-closes-in>.

- European Commission. 2021a. "Forced Displacement: Refugees, Asylum Seekers and Internally Displaced Persons (IDPs)." European Commission Website. 2021. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/forced-displacement-refugees-asylum-seekers-and-internally-displaced-persons-idps_en.
- . 2021b. "Ten Years into the Conflict: Syrian Integration in Europe." European Website on Intergration. 2021. https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/ten-years-conflict-syrian-integration-europe_en.
- Fahham, A.Muchaddam, and A.M. Kartaatmaja. 2014. "Konflik Suriah: Akar Masalah Dan Dampaknya." *Politica* 5 (1): 37–60.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/332>.
- Ferris, Elizabeth, and Kemal Kirişci. 2016. *The Consequences of Chaos: Syria's Humanitarian Crisis and the Failure to Protect. The Consequences of Chaos: Syria's Humanitarian Crisis and the Failure to Protect.*
- Fitria. 2012. "Implementasi Doktrin Responsibility To Protect (Humanitarian Intervention) Dalam Hukum Internasional (Kasus Kosovo Libya Dan Suriah)." *Lex Jurnalica* 9 (April): 44–50.
- Gagro, Sandra Fabijanic. 2014. "The Responsibility to Protect Doctrine." *International Journal of Social Science* 3 (1): 61–77. <https://doi.org/10.4324/9781315725932-29>.
- Gerlach, Daniel. 2019. "A Turn Towards Idlib in Syria – Is the Goal to 'Achieve Homogeneity' in the Country?" Washingtoninstitute.Org. 2019.
<https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/turn-towards-idlib-syria-goal-achieve-homogeneity-country>.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2017. *Studi Dan Teori Hubungan Internasional*. 1st ed. jakarta:

yayasan pustaka obor indonesia.

Hart, John, Maaïke Verbruggen, and Giovanni Maletta. 2017. "Actual Use of Chemical Weapons in Syria." *SIPRI Literature Review for the Policy and Operations Evaluations Department of the Dutch Ministry of Foreign Affairs*, no. August: 79–92.

Haviland, Sarah. 2021. "A REFLECTION ON ACCOUNTABILITY FOR CHEMICAL WEAPON USE IN SYRIA." *Interaction.Org*, November 2021.
<https://www.interaction.org/blog/a-reflection-on-accountability-for-chemical-weapon-use-in-syria/>.

Herlambang, Agus. 2018. "Mengurai Benang Kusut Konflik Di Suriah." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 1 (2): 82–93.
<https://doi.org/10.23969/transborders.v1i2.794>.

Heydemann, Steven. 2018. "Beyond Fragility: Syria and the Challenges of Reconstruction in Fierce States," no. June: 1–16. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/06/FP_20180626_beyond_fragility.pdf.

Jervis, Robert. 1994. "Realism, and the Scientific Study of International Politics." *International Politics* 61 (4): 853–853.
<https://proxy.library.upenn.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=keh&AN=9412141631&site=ehost-live>.

John, SteveBa Smith, and Patricia Owens. 2008. "Globalization of World Politis," 646.

Khaddour, Kheder. 2015. "The Assad Regime's Hold on The Syrian State." *Middle East Security Report* 8.

Kirişçi, Kemal. 2014. "Syrian Refugees and Turkey's Challenges: Going Beyond Hospitality." *Brookings Reports*, no. May: 1–46.

<http://www.brookings.edu/~media/research/files/reports/2014/05/12-turkey-syrian-refugees-kirisci/syrian-refugees-and-turkeys-challenges-may-14-2014.pdf>.

Koblentz, Gregory D. 2019. "Chemical-Weapon Use in Syria: Atrocities, Attribution, and Accountability." *Nonproliferation Review* 26 (5–6): 575–98.

<https://doi.org/10.1080/10736700.2019.1718336>.

Mamdud, Rijal. 2017. "Bashar Al-Assad Dan Kelompok Oposisi: Telaah Terhadap Representasi Konflik Suriah Pasca Arab Spring." *Lentera* 1 (2): 177–96.

Masri, Feras Al, Mattea Müller, Josefine Nebl, Theresa Greupner, Andreas Hahn, and Dorothee Straka. 2021. "Quality of Life among Syrian Refugees in Germany: A Cross-Sectional Pilot Study." *Archives of Public Health* 79 (1): 1–13. <https://doi.org/10.1186/s13690-021-00745-7>.

Mirza, Muhammad Nadeem, Hussain Abbas, and Irfan Hasnain Qaisrani. 2021. "Anatomising Syrian Crisis: Enumerating Actors, Motivations, and Their Strategies (2011-2019)." *Liberal Arts and Social Sciences International Journal (LASSIJ)* 5 (1): 41–54.

<https://doi.org/10.47264/idea.lassij/5.1.4>.

Morgenthau, Hans J. 2010. *Politik Antarbangsa*. 1st ed. Indonesia: yayasan pustaka obor indonesia.

Mudore, Syarif Bahaudin, and Nurlaila Safitri. 2019. "Dinamika Perang Suriah." *Politea : Jurnal Politik Islam* 2 (2): 67–92. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1437>.

Nasser-Eddine, Minerva. 2012. "How R2P Failed Syria." *Flinders Journal of History and Politics* 28: 16–30.

Nehme, Esther, and M Ll. 2021. "Iran ' s Intervening Power i n Syria ' s Civil War : A Realist Perspective," no. April.

- O'Bagy, Elizabeth. 2013. "Middle East Security Report 9 - The Free Syrian Army," 51.
<https://www.understandingwar.org/sites/default/files/The-Free-Syrian-Army-24MAR.pdf>.
- Padelford, Norman J. 2012. "Politics among Nations : The Struggle for Power and Peace . by Hans J" 64 (2): 290–92.
- Pita, René, and Juan Domingo. 2014. "The Use of Chemical Weapons in the Syrian Conflict." *Toxics* 2 (3): 391–402. <https://doi.org/10.3390/toxics2030391>.
- Pontoh, Jovita, I Gede Sumertha K Y, and Makmur Supriyatno. 2019. "Analisis Kekerasan Terhadap Perang Di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017)." *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 43–70.
- Reid, Kathryn. 2021. "Syrian Refugee Crisis: Facts, FAQs, and How to Help." Worldvision.Org. 2021. <https://www.worldvision.org/refugees-news-stories/syrian-refugee-crisis-facts>.
- Rijnoveanu, Carmen, and Sertif Demir. 2013. "The Impact of the Syria Crisis on the Global and Regional Political Dynamics." *Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri* 13 (1): 55–77.
- Rizqullah, Muhammad Fawwaz Syafiq, Fadhillah Jofianta Putri, Shania Afridita, and Halim Purnomo. 2020. "SYRIAN REFUGEES IN TURKEY: Implementation of Turkey Open Door Policy in Dealing with Syrian Refugees." *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial* 3 (02): 111–24. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v3i02.394>.
- Selvik, Kjetil. 2014. "Roots of Fragmentation : The Army and Regime Survival in Syria," no. 2.
- Sengupta, Kim, and Loveday Morris. 2013. "Britain Can Give Military Support to Syrian Rebels after EU Changes." *Independent.Co.Uk*, February 27, 2013.
<https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/britain-can-give-military-support-to-syrian-rebels-after-eu-changes-8513807.html>.
- SNHR. 2019a. "At Least 7 , 706 Cases of Arbitrary Arrests Documented in Syria in 2018

Including 580 in December.”

———. 2019b. “Documentation of 72 Torture Methods the Syrian Regime Continues to Practice in Its Detention Centers and Military Hospitals Identifying 801 Individuals Who Appeared in Caesar Photographs , the US Congress Must Pass the Caesar Act to Provide Accountability.”

———. 2021. “The Tenth Annual Report on Enforced Disappearance in Syria on the International Day of the Victims of Enforced Disappearances; Long Years of Constant Grief and Loss,” no. June.

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/The_Tenth_Annual_Report_on_Enforced_Disappearance_in_Syria_on_the_International_Day_of_the_Victims_of_Enforced_Disappearances_Long_Years_of_Constant_Grief_and_Loss_en.pdf.

———. 2022. “1,271 Civilians, Including 299 Children, 134 Women, and 104 Victims of Torture, Killed in Syria in 2021.” [https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/1271-civilians-including-299-children-134-women-and-104-victims-torture#:~:text=Michelle Bachelet%2C on September 24,Suburbs%2C Homs%2C Idlib%2C then](https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/1271-civilians-including-299-children-134-women-and-104-victims-torture#:~:text=Michelle%20Bachelet%20on%20September%2024,Suburbs%20Homs%20Idlib%20then).

Spiegel. 2009. “Peace without Syria Is Unthinkable.” *Spiegel International*, 2009.

<https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-with-syrian-president-bashar-assad-peace-without-syria-is-unthinkable-a-602110.html>.

Spyer, Jonathan, Source World Affairs, No M A Y June, and Jonathan Spyer. 2017. “Meet the Free Syrian Army.” *DEFYING A DICTATOR: Meet the Free Syrian Army* 175 (1): 45–52. <http://www.jstor.org.ezproxy.library.ubc.ca/stable/pdf/41638991.pdf?refreqid=excelsior%3Af1268d67f6621f8dca334ec00aeaff1f>.

Tan, Kim Hua, and Alirupendi Perudin. 2019. “The ‘Geopolitical’ Factor in the Syrian Civil

War: A Corpus-Based Thematic Analysis.” *SAGE Open* 9 (2).

<https://doi.org/10.1177/2158244019856729>.

Tasnur, Irvan, and Fitra Widya Wati. 2019. “Konflik Sunni-Syiah Pasca Arab Spring: Menelusuri Motif Politik Dibalik Perang Berkepanjangan Di Suriah.” *Jurnal Academia Praja* 2 (02). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.112>.

TOBIAS SCHNEIDER, THERESA LÜTKEFEND. 2019. “Nowhere to Hide The Logic of Chemical Weapons Use in Syria STUDY.” *Science*. Vol. 363. <https://doi.org/10.1126/science.363.6432.1142>.

UNHCR. 2021a. “Disappearance and Detention to Suppress Dissent a Hallmark of a Decade of Conflict in Syria – UN Report.” <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/disappearance-and-detention-suppress-dissent-hallmark-decade-conflict-syria#:~:text=Tens of thousands of people,less frequently%2C for financial gain>.

———. 2021b. “Syria Refugee Crisis – Globally, in Europe and in Cyprus.” UNHCR The UN Refugee Agency. 2021. <https://www.unhcr.org/cy/2021/03/18/syria-refugee-crisis-globally-in-europe-and-in-cyprus-meet-some-syrian-refugees-in-cyprus/>.

———. 2022. “SYRIA REFUGEE CRISIS.” <https://www.unrefugees.org/emergencies/syria/>.

Zafer Kizilkaya, Sofie Hamdi, Mohammad Salman. 2021. “THE SYRIAN CONFLICT AFTER A DECADE.”